KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

# LAPORAN TAHUNAN

## INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2022

*MINISTRY OF TRANSPORTATION INSPECTORATE GENERAL ANNUAL REPORT 2022*

## PENGUATAN PENGAWASAN SEKTOR TRANSPORTASI

*Strengthening Supervision Transportation Sector*

# 2022

# Penguatan Pengawasan Sektor Transportasi
## *Strengthening Supervision Transportation Sector*

Pelaksanaan Transformasi Birokrasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Reformasi Birokrasi Nasional sampai dengan tahun 2025 ditargetkan berada pada tahap ketiga yaitu *Dynamic Governance* dimana pada tahap ini diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, pengelolaan anggaran yang baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan serta hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan).

Kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi berawal dikarenakan adanya isu strategis birokrasi yang dinilai bahwa kinerja pemerintah saat itu belum bersih, kurang akuntabel, berkinerja rendah, pemerintah yang belum efektif dan efisien serta pelayanan publik yang masih buruk sehingga perlu dilakukan perbaikan pada 8 area perubahan agar tercapainya *good governance*. Salah satu area perubahan yang perlu ditingkatkan adalah pada area penguatan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pengendalian telah dilakukan secara berjenjang. Area ini menjadi amanat utama Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan internal.

Peran Inspektorat Jenderal agar tercapainya *good governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu selalu berupaya adaptif terhadap perkembangan zaman dan fokus pada penguatan pengawasan sektor transportasi melalui peningkatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi SDM, fokus program pengawasan pada kegiatan strategis, pengembagan dan penggunaan sistem informasi pengawasan serta melakukan kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholders* dalam mengawal transportasi nasional.

*The implementation of Bureaucratic Transformation in Indonesia aims to create a clean government and good governance following the mandate of Presidential Regulation Number 81 of 2020 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010–2025.*

*National Bureaucratic Reform until 2025 is targeted to be in the third stage, namely Dynamic Governance where at this stage it is expected to produce quality governance. The better the quality of governance, the better the development outcomes (development outcomes) which are characterized by no corruption, no violations, good budget management, all programs completed properly, all permits completed quickly and precisely, communication with the public is good, use of effective and productive time (work hours), consistent and sustainable application of reward and punishment as well as real development results (pro-growth, pro-employment, and pro-poverty reduction).*

*The framework for the implementation of Bureaucratic Reform began due to a strategic issue of the bureaucracy which was assessed that the government's performance at that time was not clean, less accountable, low performing, the government was not yet effective and efficient and public services were still poor so it was necessary to make improvements in 8 areas of change to achieve good governance. One area of change that needs to be improved is the area of strengthening supervision which aims to ensure that the control mechanism has been carried out in stages. This area is the main mandate of the Inspectorate General in carrying out internal supervision.*

*The role of the Inspectorate General to achieve good governance within the Ministry of Transportation is to always try to be adaptive to the times and focus on strengthening the supervision of the transportation sector through improving the regulatory framework, increasing the competence of human resources, focusing the supervision program on strategic activities, developing and using supervisory information systems and conducting cooperation and partnerships with stakeholders in overseeing national transportation.*

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Terlebih, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan analisis atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut. Konsep tiga E yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas membentuk dasar dari setiap kegiatan pengawasan. Pada dasarnya, tujuan manajemen adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi.

*Supervision can be defined as a process to ensure that organizational and management objectives can be achieved. This relates to ways of making activities according to plan. Supervision is basically fully directed to avoid the possibility of misappropriation or deviation from the objectives to be achieved. through supervision is expected to help carry out the policies that have been set to achieve the goals that have been planned effectively and efficiently. In fact, through supervision an activity is created that is closely related to the determination or evaluation of the extent to which work has been carried out. Supervision can also detect the extent to which the leadership's policies are implemented and to what extent deviations occur in the implementation of the work.*

*In order to carry out the transformation to achieve improvements in the quality of government organizations, it is necessary to supervise all actions of the transformation process. The concept of the three E namely economy, efficiency and effectiveness forms the basis of any supervisory activity. Basically, the goal of management is to increase productivity and lower costs. If deficiencies and errors are known early, repairs and improvements can be made quickly, meaning that all problems can be anticipated.*

# Sambutan Inspektur Jenderal
## *Message From The Inspector General*

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) sebagai unit pengawasan mempunyai peran penting dalam mewujudkan pengawasan yang senantiasa memberi nilai tambah bagi Kementerian Perhubungan. Dengan peningkatan efektivitas proses kegiatan pengawasan, *whistleblowing system*, dan peningkatan akuntabilitas aparatur, Itjen Kemenhub turut serta memastikan pencapaian tujuan Kemenhub. Peran penting ini tergambar dalam visi Inspektorat Jenderal 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* dalam mengawal akuntabilitas Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah".

Tahun 2022 menjadi tahun penentu terhadap peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, karena Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* dan *trust advisor* berperan dalam mengawal program-program Kementerian Perhubungan dengan melaksanakan kerja sama dan kemitraan serta bersinergi tidak hanya pada lingkup internal Kementerian Perhubungan, tetapi juga lintas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022, Itjen telah melaksanakan peningkatan pengawasan terhadap tata kelola pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pengawasan terhadap kegiatan strategis antara lain Pengelolaan PNBP/BLU, Proyek Strategis Nasional (PSN), Prioritas Nasional, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang menjadi fokus dari Menteri Perhubungan.

Kegiatan Itjen tahun 2022 secara menyeluruh dapat tergambar pada laporan tahunan ini, sekaligus sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi yang bermanfaat sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 ini. Semoga laporan tahunan ini bermanfaat dan mampu memberikan nilai tambah untuk perbaikan Inspektorat Jenderal pada periode selanjutnya.

*The Inspectorate General of the Ministry of Transportation as a supervisory unit has an important role in realizing supervision that always provides added value to the Ministry of Transportation. By increasing the effectiveness of the process of monitoring activities, and the whistleblowing system, and increasing the accountability of apparatus, the Inspector General of the Ministry of Transportation participates in ensuring the achievement of the objectives of the Ministry of Transportation. This important role is illustrated in the Inspectorate General's 2020-2024 vision, namely "The realization of the Inspectorate General as a strategic partner and trusted advisor in overseeing the accountability of the Ministry of Transportation in realizing reliable, competitive connectivity and providing added value".*

*2022 will be a decisive year for improving the performance of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation because the Inspectorate General as a strategic partner and trust advisor plays a role in overseeing the Ministry of Transportation's programs by carrying out cooperation and partnerships and synergizing not only within the internal scope of the Ministry of Transportation, but also across Ministries, Institutions, and Local Government.*

*In 2022, the Inspectorate General has carried out increased supervision of government governance within the Ministry of Transportation and supervision of strategic activities including PNBP/BLU Management, National Strategic Projects, National Priorities, and Increased Use of Domestic Products which are becoming the focus of the Minister of Transportation.*

*The activities of the Inspectorate General in 2022 as a whole can be described in this annual report, as well as a form of transparency in the implementation of tasks and functions which is useful as feedback in improving performance.*

*We thank all those who have contributed to the preparation of the 2022 Inspectorate General's Annual Report. Hopefully, this annual report is useful and able to provide added value for the improvement of the Inspectorate General in the next period.*

Jakarta, 14 Maret 2023
INSPEKTUR JENDERAL

MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO

# DAFTAR ISI

# *TABLE OF CONTENTS*

00

**TEMA DAN URAIAN TEMA** I
*THEME AND THEME DESCRIPTION*

**SAMBUTAN INSPEKTUR JENDERAL** II
*MESSAGE FROM THE INSPECTOR GENERAL*

**DAFTAR ISI** III
*TABLE OF CONTENTS*

**DAFTAR GAMBAR** V
*LIST OF FIGURES*

**DAFTAR TABEL** VIII
*LIST OF TABLES*

**DAFTAR GRAFIK** VIII
*LIST OF GRAPHS*

**DAFTAR BAGAN** IX
*LIST OF CHARTS*

01

**PROFIL ITJEN**
*INSPECTORATE GENERAL PROFILE*

Tugas dan Fungsi 2
*Duties and Functions*

Struktur Organisasi 3
*Organizational Structure*

Komposisi Pegawai Tahun 2022 4
*Employee Composition in 2022*

Visi dan Misi 5
*Vision and Mission*

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 6
*Anti-Bribery Management System*

Nilai-Nilai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 6
*Values of The Ministry of Transportation*

02

**KILAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL**
*INSPECTORATE GENERAL PERFORMANCE REVIEW*

Itjen dalam Angka 8
*Inspectorate General in Figures*

Peristiwa Penting 26
*Key Events*

# DAFTAR ISI

# *TABLE OF CONTENTS*

**03** **SUMBER DAYA MANUSIA ITJEN**
*HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF ITJEN*

Profil Sumber Daya Manusia 33
*Human Resources Profile*

Pengelolaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 34
*Human Resources Management and Improvement*

**04** **KEGIATAN STRATEGIS**
*STRATEGIC EVENT*

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK) 39
*National Strategy for Prevention of Corruption*

Pengawasan Pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare 40
*Supervision of Makassar-Parepare Railway Development*

Pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) 40
*Supervision of National Strategic Projects*

Pengawasan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) 42
*Supervision of The Construction of The Jakarta-Bandung Fast Train*

**05** **PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA**
*FACILITIES AND INFRASTRUCTURE*

Dukungan Sistem Informasi Pengawasan 44
*Supervision Information System Support*

Dukungan Sarana Alat Bantu Audit 45
*Audit Facility Support Tools*

**06** **KETERLIBATAN *STAKEHOLDER*** 46
*STAKEHOLDER INVOLVEMENT*

**07** **REGULASI** 49
*REGULATION*

**08** **PENGELOLAAN KEUANGAN** 51
*FINANCIAL MANAGEMENT*

**09** **KEGIATAN PENUNJANG**
*SUPPORTING ACTIVITIES*

Media Sosial Inspektorat Jenderal 55
*Social Media Inspectorate General*

Buletin dan Film Pendek Inspektorat Jenderal 56
*Inspectorate General Bulletin and Short Movie*

**10** **PENUTUP** 58
*Closing*

# DAFTAR GAMBAR
# *LIST OF FIGURES*

**Sambutan Inspektur Jenderal** I
*Inspector General's Greeting*

**SDM Berdasarkan Gender** 4
*HR Based On Gender*

**SDM Berdasarkan Jabatan** 4
*HR Based On Position*

**SDM Berdasarkan Golongan** 4
*HR Based On Class*

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan** 6
*Anti-Bribery Management System*

**Nilai-Nilai Inspektorat Jenderal** 6
*Values of the Inspectorate General*

**Rata-Rata Capaian Kinerja Program** 8
*Average Program Performance Accomplishment*

**Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan** 8
*Average Key Performance Accomplishment*

**Capaian Kinerja Pengawasan Intern Tahun 2022** 10
*Accomplishment of Internal Control Performance in 2022*

**Audit Kinerja pada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak** 11
*Performance Audit at Tanjung Perak Main Port Authority*

**Audit Kinerja pada Balai Pengujian Kereta Api Jawa Barat** 12
*Performance Audit at the Railway Testing Center West Java*

**Audit Kinerja Peningkatan Jalur KA Padang-Pariaman dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus** 12
*Performance Audit of the Padang-Pariaman Railway Line and Development of the Bungus Bay Crossing Port*

**Audit Kinerja pada KSOP Kelas II Cirebon** 13
*Performance Audit on KSOP Class II Cirebon*

**Audit Kinerja di Sorong, Papua Barat** 13
*Performance Audit in Sorong, West Papua*

**Audit Kinerja di Sulawesi Tengah** 14
*Performance Audit at Central Sulawesi*

**ADTT Sistem Aplikasi INAPORTNET di KSOP Kelas I Panjang** 15
*ADTT INAPORTNET Application System in KSOP Class I Panjang*

**ADTT pada UPP Kelas II Bulukumba** 15
*ADTT at UPP Class II Bulukumba*

**Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah** 16
*Review of Internal Control of Financial Reporting at the Central Java Railway Engineering Center*

**Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAKPA/B di KSOP Kelas III Lembar** 17
*Annual Financial Report Review in KSOP Class III Lembar*

**Evaluasi Aksi STRANAS-PK pada Otoritas Pelabuhan Utama Belawan** 18
*Evaluation of STRANAS-PK Actions at the Belawan Main Port Authority*

# DAFTAR GAMBAR
# *LIST OF FIGURES*

**Evaluasi Zona Integritas Wilayah Makassar** 18
*Evaluation of the Makassar Region Integrity Zone*

**Pemantauan Malam Pergantian Tahun Baru 2022 - 2023** 19
*New Year's Eve Monitoring 2022-2023*

**Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Semarang Provinsi Jawa Tengah** 20
*Monitoring Christmas and New Year 2022-2023 in Semarang, Central Java Province*

**Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Danau Toba** 20
*Monitoring Christmas and New Year 2022-2023 on Lake Toba*

**Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Pelabuhan Penyeberangan Merak** 21
*Monitoring Christmas and New Year 2022-2023 at the Merak Crossing Port*

**Pengawasan Pelepasan Kapal Perintis Type GT 2000 KM. Sabuk Nusantara 89 di Pontianak** 22
*(Supervision of the Discharge of the Pioneer Vessel Type GT 2000 KM. Nusantara Belt 89 in Pontianak*

**Konsultasi Kebijakan Bus Rapid Transit dengan Konsep *Buy the Service*** 22
*Bus Rapid Transit Policy Consultation with Buy the Service Concept*

**Kegiatan Mudik Gratis yang Digelar Kementerian Perhubungan di Terminal Baranangsiang, Bogor** 26
*ree Homecoming Activities Held by the Ministry of Transportation at the Baranangsiang Terminal, Bogor*

**Pemantauan Arus Mudik Lebaran 1443 H Hari Pertama pada Pelabuhan Semayang Balikpapan** 26
*Monitoring the First Day of Eid 1443 H at Semayang Harbor, Balikpapan*

**Pemantauan Arus Mudik Lebaran 1443H Hari Kedua pada Pelabuhan ASDP Kariangau dan Terminal Tipe A Batu Ampar** 27
*Monitoring of Eid 1443 H Second Day at ASDP Kariangau Port and Type A Terminal Batu Ampar*

**Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern** 27
*Opening of the National Coordination Meeting of Internal)*

**Kementerian Perhubungan Kembali Meraih Predikat WTP dari BPK RI** 28
*Ministry of Transportation Receives WTP Predicate from BPK RI*

**Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Evaluasi Kinerja Semester I dan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Semester II Tahun 2022** 28
*Technical Coordination Meeting of Semester I Performance Evaluation and Preparation of the 2022 Semester II Performance Action Plan*

**Penandatanganan Nota Kesepahaman BPKP dengan Kementerian Perhubungan** 29
*BPKP Signing of Memorandum of Understanding with the Ministry of Transportation*

**Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan** 29
*Establishment of the Ministry of Transportation Audit Committee*

# DAFTAR GAMBAR
# *LIST OF FIGURES*

**Serah Terima Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan** 30
*Handover of the Position of Inspector General of the Ministry of Transportation*

**Pembukaan Flagoff Touring Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai** 31
*Opening of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Touring Flagoff*

**Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 Kementerian Perhubungan** 31
*Commemoration of World Anti-Corruption Day 2022 Ministry of Transportation*

**Komposisi Penambahan SDM Tahun 2022** 33
*Composition of Additional HR in 2022*

**SDM Pendukung** 33
*Additional HR*

**Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko** 36
*Risk Based Supervision Planning Training*

**Pelatihan Manajemen Risiko** 36
*Risk Management Training*

**Workshop Penerapan Manajemen Risiko** 36
*Risk Management Implementation Workshop*

**Bimbingan Teknis Implementasi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko** 36
*Integrated SPIP Implementation and Risk Management Technical Guidance*

**Bimbingan Teknis Fotografi, Videografi dan Jurnalistik** 37
*Technical Guidance on Photography, Videography and Journalism*

**Pelatihan System Dynamics Modelling** 37
*System Dynamics Modeling Training*

**Bimbingan Teknis Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021** 37
*Technical Guidance Evaluation on the Implementation of SAKIP in 2021*

**Bimbingan Teknis Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dan Pembahasan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP** 37
*APIP Capability Improvement Task Force Technical Guidance and Discussion of APIP Capability Self-Assessment Working Paper*

**STRANAS-PK di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara** 39
*STRANAS-PK at Belawan Port, North Sumatra*

**STRANAS-PK di Pelabuhan Utama Makassar Sulawesi Selatan** 39
*STRANAS-PK at Makassar Main Port, South Sulawesi*

**Pemantauan Progres Pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare** 40
*Monitoring the Progress of the Makassar-Parepare Railway Development*

**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional Pelabuhan Patimban** 40
*Monitoring and Evaluation of the Implementation of the Construction of Patimban Port Operational Support Facilities*

**Pemantauan Pekerjaan Proyek Strategis Nasional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur** 41
*Monitoring of National Strategic Project Work in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara*

# DAFTAR GAMBAR
# *LIST OF FIGURES*

**Revitalisasi Terminal Bus Tipe A di Jawa Timur** 41
*Revitalization of Type A Bus Terminal in East Java*

**Pemantauan Progress Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar Bandung** 42
*Monitoring the Progress of the Jakarta Bandung Fast Train Development at Tegalluar Bandung Station*

**Pemantauan Progress Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Padalarang Bandung** 42
*Monitoring the Progress of the Jakarta Bandung Fast Train Development at Padalarang Bandung Station*

**Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI** 47
*Commission V DPR RI Working Visit)*

**Koordinasi Pelayanan Publik Sektor Perhubungan Laut Bersama KPK di Provinsi Nusa Tenggara Barat** 47
*Coordination of Public Services in the Sea Transportation Sector with the KPK in West Nusa Tenggara Province*

**Koordinasi Pelayanan Publik Sektor Perhubungan Laut Bersama KPK di Provinsi Bali** 48
*Coordination of Public Services in the Sea Transportation Sector with the KPK in Bali Province*

**Koordinasi Kementerian Perhubungan dan PT. PELNI terkait Evaluasi Penugasan Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi Tahun Anggaran 2022** 48
*Coordination of the Ministry of Transportation and PT. PELNI regarding Evaluation of Public Service Obligation Assignment and Subsidies for Fiscal Year 2022*

**Capaian Media Sosial Inspektorat Jenderal** 55
*Inspectorate General Social Media Accomplishment)*

**Buletin dan Film Pendek Inspektorat Jenderal** 56
*Inspectorate General Bulletin and Short Movie*

# DAFTAR TABEL
# *LIST OF TABLES*

**Capaian Kinerja Unit Eselon I Tahun 2022** 8
*Accomplishment of Echelon I Performance in 2022*

**Capaian Kinerja Unit Eselon II Tahun 2022** 8
*Accomplishment of Echelon II Performance in 2022*

**Sertifikasi Profesi Auditor ITJEN** 35
*ITJEN Professional Certifications Detail*

**Dukungan Alat Bantu Audit** 45
*Audit Facility Support Tools*

**Jumlah Produk Hukum ITJEN** 50
*Number of ITJEN Legal Products*

**Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja** 53
*Financial Management Based on Expenditure Type*

# DAFTAR BAGAN
# *LIST OF CHARTS*

**Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal** 3
*Organizational Structure of the Inspectorate General*

**Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal** 3
*Organizational Structure of the Secretariat Inspectorate General*

**Produk Hukum Tahun 2022** 50
*Legal Product of 2022*

# DAFTAR GRAFIK
# *LIST OF GRAPHS*

**SDM Berdasarkan Pendidikan** 4
*HR Based On Education*

**SDM Berdasarkan Unit Kerja** 4
*HR Based On Work Unit*

**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan** 10
*Number of Supervision Activities*

**Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan** 10
*Target and Realization of Supervision Activities*

**Realisasi Kegiatan Audit Kinerja Tahun 2022** 11
*Performance Audit Realization in 2022*

**Realisasi Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu 2022** 4
*Realization of Specific Audit Purpose in 2022*

**Realisasi Kegiatan Reviu Tahun 2022** 6
*Review Realization in 2022*

**Realisasi Kegiatan Evaluasi Tahun 2022** 17
*Evaluation Realization in 2022*

**Realisasi Kegiatan Pemantauan Tahun 2022** 19
*Monitoring Realization in 2022*

**Realisasi Kegiatan Pengawasan Lainnya Tahun 2022** 21
*Other Supervision Realization in 2022*

**Rekapitulasi Data Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Posisi Per Januari 2023** 23
*Recapitulation of Audit Results Data Position 2023*

**Grafik Penanganan Pengaduan Tahun 2022** 23
*Complaints Handling in 2022*

**Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2022** 24
*Complaints Follow up in 2022*

**Pengaduan yang Terkumpul dari 2019 - 2022** 24
*Complaints Based on Submission 2019 - 2022*

**Pengaduan yang Diterima dari 2019 - 2022** 24
*Complaints Received Based on Channel 2019 - 2022*

**Predikat Zona Integritas (ZI)** 25
*Integrity Zone Predicate*

**Penambahan Sumber Daya Itjen 2019-2022** 33
*Inspectorate General Resources 2019-2022*

**Profil Jabatan Fungsional Tertentu** 33
*Specific Functional Profile Positions*

**Profil Jabatan Fungsional Auditor** 34
*Auditor Profile Positions*

**Profil Jabatan Fungsional Umum** 34
*General Profile Positions*

**Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM 2022** 35
*HR Competency Development 2022*

**Dukungan Sistem Informasi Pengawasan** 44
*Supervision Information System Support*

**Realisasi Belanja** 52
*Expenditure Realization*

**Belanja Tahun 2022** 52
*Budget in 2022*

**Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Unit Kerja** 53
*Financial Management Based on Work Field*

# 01 PROFIL ITJEN

## *THE INSPECTORATE GENERAL PROFILE*

# TUGAS DAN FUNGSI
# *DUTIES AND FUNCTIONS*

## Tugas *(Duties)*

Inspektorat Jenderal sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

*The Inspectorate General as one of the Government's Internal Supervisory Apparatus supervises all activities in the context of implementing the duties and functions of the Ministry of Transportation. This is expressly regulated in the Minister of Transportation Regulation Number 17 of 2022 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Transportation, that the Inspectorate General has the task of carrying out internal supervision within the Ministry of Transportation*

## Fungsi *(Functions)*

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

*In performing these duties, the Inspectorate General has the following functions:*

1. *Preparing technical policy of internal audit on the performance of duties within the Ministry of Transportation.*
2. *Exercising internal control over the execution of duties in the Ministry of Transportation with respect to performance and expenditure through audit, review, evaluation, monitoring, and other supervisory activities.*
3. *Conducting audit for specific purposes as assigned by the Minister of Transportation.*
4. *Preparing supervisory reports on the performance of duties within the Ministry of Transportation.*
5. *Executing administrative tasks of the Inspectorate General.*
6. *Executing of other functions given by Minister of Transportation.*

# Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

**Ir. Mohamad Pramintohadi Sukarno, M.Sc**

Inspektur Jenderal
*(Inspectorate General)*

**Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA.**

Sekretaris Inspektorat Jenderal
*(Secretariat of the Inspectorate General)*

**Baitul Ihwan, S.H., DESS.**

Inspektur I
*(Inspectorate I)*

**Dr. Ir. Fadrinsyah Anwar, MBA., CGCAE., CRGP.**

Inspektur II
*(Inspectorate II)*

**Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA**

Inspektur III
*(Inspectorate III)*

**Capt. Sahattua P. Simatupang. M.M., M.H., CGCAE**

Inspektur IV
*(Inspectorate IV)*

**Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA**

Plt Inspektur Investigasi
*(Investigative Inspectorate)*

# Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

**Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA.**

Sekretaris Inspektorat Jenderal
*(Secretariat of the Inspectorate General)*

**Triadi Nuryanto, S.E., M.M.Tr**

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
*(Planning and Evaluation)*

**Dr. Maizar Radjin, S.E., M.Ak., QIA., QRMA**

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
*(Human Resources, Organization and Governance)*

**Ni Widaningsih, S.E.**

Kepala Bagian Keuangan dan Umum
*(Finance and General)*

**Benny Yuli Putranto, S.T., M.A.**

Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas
*(Management of Oversight Results, Law and Public Relations)*

# KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2022
# *EMPLOYEE COMPOSITION IN 2022*

## SDM Berdasarkan Gender
*HR Based On Gender*

**220**
Pegawai Laki-Laki
*Male Employees*

**118**
Pegawai Perempuan
*Female Employees*

## SDM Berdasarkan Jabatan
*HR Based On Position*

| Struktural *Structural* | Fungsional Auditor *Auditor Functional* |
|---|---|
| 10 | 221 |

| Fungsional Tertentu *Specific Functional* | Fungsional Umum *General Functional* |
|---|---|
| 26 | 81 |

## SDM Berdasarkan Unit Kerja
*HR Based On Work Unit*

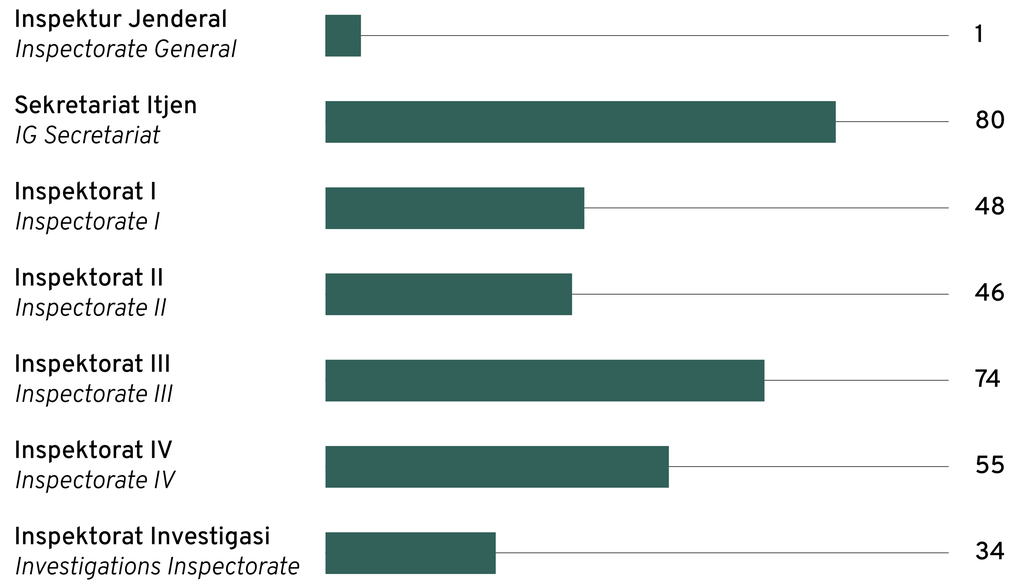


## SDM Berdasarkan Pendidikan
*HR Based On Education*

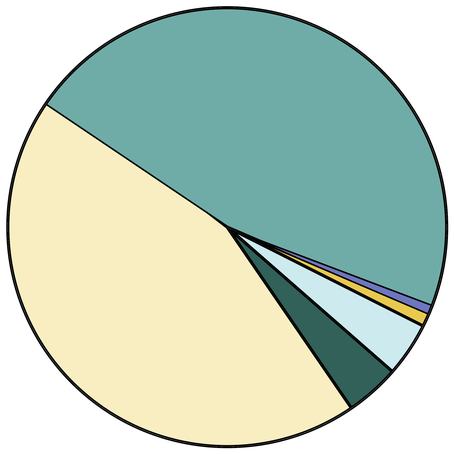

| | | |
|---|---|---|
| S-3 | 5 | (1.5%) |
| S-2 | 100 | (30%) |
| S-1 | 168 | (50%) |
| D-3 | 55 | (16%) |
| SLTA/ D-1 | 9 | (3%) |
| SLTP | 1 | (0.5%) |

## SDM Berdasarkan Golongan
*HR Based On Class*

| Golongan IV *Class IV* | Golongan III *Class III* | Golongan II *Class II* | Golongan I *Class I* |
|---|---|---|---|
| 47 | 228 | 63 | 0 |

# VISI DAN MISI
# *VISION AND MISSION*

## Visi *(Vision)*

Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai *strategic* partner dan *trusted advisor* dalam mewujudkan konektivitas yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

*The realization of the Inspectorate General as a strategic partner and trusted advisor in realizing connectivity that is reliable, competitive and provides added value to support the realization of the vision and mission of the President and Vice President.*

## Misi *(Mission)*

1. Meningkatkan peran SPIP dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan pengawasan intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang inovatif, integritas dan amanah.
4. Mencegah dan menindak penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
5. Meningkatkan layanan pengawasan intern.
6. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengawasan
7. Mewujudkan organisasi pengawasan yang *agile*, efektif dan efisien.
8. Mewujudkan pengembangan inovasi teknologi bidang pengawasan.

1. *Increasing the role of SPIP and compliance with laws and regulations.*
2. *Support bureaucratic reform to improve public services.*
3. *Realizing internal control, risk management and governance that is innovative, integrity and trustworthy.*
4. *Prevent and take action against irregularities and abuse of authority.*
5. *Improving internal control services.*
6. *Improving the competence and professionalism of supervisory HR.*
7. *Creating an agile, effective and efficient supervisory organization.*
8. *Realizing the development of technological innovation in the field of supervision.*

## Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
*Anti-Bribery Management System*

### No Bribery
**Menolak suap menyuap dan pemerasan**
*Refuse bribery and extortion*

### No Gift
**Menolak hadiah/gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**
*Refuse gifts/gratuities that are contrary to applicable regulations*

### No Luxury Hospitality
**Menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan**
*Refuse extravagant receptions and entertainment*

### No Kickback
**Menolak komisi/tanda terima kasih baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya**
*Refuse commissions/receipts either in the form of money or other forms*

*Sesuai IM NOMOR 9 TAHUN 2021 tentang Penerapan Prinsip 4 No's di Lingkungan Kementerian Perhubungan

## Nilai-Nilai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
*Values of the Inspectorate General Ministry of Transportation*

### Profesional
*Professional*

Merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap Insan Perhubungan dalam melaksanakan tugas.

*It is the basic capital that must be owned by every Transportation Personnel in carrying out their duties.*

### Integritas
*Integrity*

Merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap Insan Perhubungan dalam melaksanakan pekerjaan dan pengabdian kepada profesi dan organisasi.

*It is the attitude and behavior that must be owned by every Transportation Personnel in carrying out work and dedication to the profession and organization.*

### Amanah
*Reliance*

Merupakan sikap luhur yang harus dimiliki oleh setiap Insan Perhubungan untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

*It is a noble attitude that must be possessed by every Communication Personnel to be accountable to God Almighty.*

# 02

# KILAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

## *INSPECTORATE GENERAL PERFORMANCE REVIEW*

# ITJEN DALAM ANGKA
# *INSPECTORATE GENERAL IN FIGURES*

## CAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I TAHUN 2022
*ACCOMPLISHMENT of ECHELON I UNIT PERFORMANCE in 2022*

| | Sasaran Program *Program Objectives* | Indikator Kinerja Program *Program Performance Indikator* | Satuan *Measurement* | Target *Target* | Realisasi *Realization* | Persentase Capaian *%Accomplishment* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah *(Internal Control that Provides Added Value)* | Persentase Rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti *(Percentage of BPK LHP Recommendations Followed Up)* | Persen *(Percent)* | 77 | 82,65 | 107,33 |
| 02 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Increasing the Quality of Good Governance)* | Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan *(Bureaucratic Reform value of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation)* | Nilai *(Score)* | 78,5 | 92,10 | 117,32 |
| 03 | Meningkatnya Layanan Pengawasan *(Increased Supervision Services)* | Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi *(Supervisory Satisfaction Level by Auditi)* | Persen *(Percent)* | 67 | 88,88 | 131,34 |
| 04 | Meningkatnya Layanan Pengawasan *(Increased Supervision Services)* | Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu *(Percentage of Follow-Up Handling of Supervision Consultation on Time)* | Persen *(Percent)* | 85 | 88,88 | 88,24 |
| 05 | Meningkatnya Layanan Pengawasan *(Increased Supervision Services)* | Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan *(Percentage of Follow-Up Complaints within the Ministry of Transportation)* | Persen *(Percent)* | 87 | 81,26 | 82,32 |

### Rata-Rata Capaian Kinerja Program
*Average Program Performance Accomplishment*

**105,31%**

## CAPAIAN KINERJA UNIT ESELON II TAHUN 2022
*ACCOMPLISHMENT of ECHELON II UNIT PERFORMANCE in 2022*

| | Sasaran Kegiatan *Activity Objectives* | Indikator Kinerja Kegiatan *Key Performance Indikator* | Satuan *Measurement* | Target *Target* | Realisasi *Realization* | Persentase Capaian *%Accomplishment* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif *(Effective Oversight Business Process)* | Tingkat Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah IACM *(Government Internal Apparatus Capability Level)* | Level *(Level)* | 3 (90%) | 3 (99,16%) | 110,18 |
| 02 | Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif *(Effective Oversight Business Process)* | Nilai Maturitas SPIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal *(SPIP Maturity Value in the Inspectorate General environment)* | Level *(Level)* | 3 | 3 | 100 |
| 03 | Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif *(Effective Oversight Business Process)* | Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik *(Percentage of Internal Peer Review Results within the Inspectorate General with Good Category)* | Persen *(Percent)* | 80 | 100 | 125 |
| 04 | Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas *(Quality Supervision Implementation)* | Persentase Rekomendasi LHP BPK yang Ditindaklanjuti *(Percentage of BPK's LHP Recommendations That Were Followed Up)* | Persen *(Percent)* | 77 | 82,64 | 107,32 |
| 05 | Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas *(Quality Supervision Implementation)* | Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti *(Percentage of LHA Inspectorate General Findings Followed Up)* | Persen *(Percent)* | 86 | 90,84 | 105,63 |
| 06 | Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas *(Quality Supervision Implementation)* | Persentase Nilai Evaluasi Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan *(Percentage of SPIP Maturity Evaluation Value in the Ministry of Transportation)* | Persen *(Percent)* | 85 | 100 | 117,65 |
| 07 | Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas *(Quality Supervision Implementation)* | Persentase Laporan Keuangan Unit Eselon I yang Telah Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah *(Percentage of Financial Statements that have complied with Government Accounting Standards)* | Persen *(Percent)* | 45 | 45 | 100 |

# ITJEN DALAM ANGKA
# *INSPECTORATE GENERAL IN FIGURES*

| | Sasaran Kegiatan *Activity Objectives* | Indikator Kinerja Kegiatan *Key Performance Indikator* | Satuan *Measurement* | Target *Target* | Realisasi *Realization* | Persentase Capaian *%Accomplishment* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas *(Quality Supervision Implementation)* | Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan *(Percentage BB Predicated SAKIP Scores in the Ministry of Transportation)* | Persen *(Percent)* | 81,7 | 100 | 122,4 |
| 09 | Terwujudnya Implementasi Pengawasan yang Berkualitas *(Quality Supervision Implementation)* | Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan *(Percentage of Approval of BMN Requirements for RKBMN Review Results within the Ministry of Transportation)* | Persen *(Percent)* | 74 | 88 | 118,92 |
| 10 | Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif *(Effective Oversight Business Process)* | Persentase Nilai Anggaran Terkoreksi dalam Reviu RKA *(Percentage of Corrected Budget Value in RKA Review)* | Persen *(Percent)* | 27 | 23,98 | 112,67 |
| 11 | Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif *(Effective Oversight Business Process)* | Tingkat Kepuasan Pengawasan oleh Auditi *(Supervisory Satisfaction Level by Auditi)* | Persen *(Percent)* | 67 | 88 | 131,34 |
| 12 | Terwujudnya Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif *(Effective Oversight Business Process)* | Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan *(Percentage of Follow-Up Complaints within the Ministry of Transportation)* | Persen *(Percent)* | 87 | 100 | 114,94 |
| 13 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pengawasan yang Kompeten *(Competent Oversight Human Resources)* | Persentase Auditor yang Memenuhi Kompetensi *(Percentage of Auditors Who Meet Competence)* | Persen *(Percent)* | 75 | 88,88 | 118,51 |
| 14 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal *(The value of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) of the Inspectorate General)* | Persen *(Percent)* | 86 | 81,26 | 94,49 |
| 15 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal *(The Value of Bureaucratic Reform of the Inspectorate General)* | Persen *(Percent)* | 78,5 | 92,1 | 117,32 |
| 16 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal *(Percentage of Compliance Level of LHKPN Reporting within the Inspectorate General)* | Persen *(Percent)* | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Persentase Peraturan yang Ditetapkan dan Disosialisasikan *(Percentage of Regulations Defined and Socialized)* | Persen *(Percent)* | 100 | 40 | 40 |
| 18 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Persentase Dokumen Kerjasama dan Kemitraan yang Ditindaklanjuti *(Percentage of Cooperation and Partnership Documents Followed Up)* | Persen *(Percent)* | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Persentase Pegawai yang Melaporkan LHKASN di Lingkungan Kementerian Perhubungan *(Percentage of Employees Reporting LHKASN within the Ministry of Transportation)* | Persen *(Percent)* | 95 | 100 | 105,26 |
| 20 | Terwujudnya Organisasi *Fit for Purpose (Organization Fit for Purpose)* | Jumlah Unit Kerja Kementerian Perhubungan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM *(Number of Work Units of the Ministry of Transportation Obtaining the WBK/WBBM Predicate)* | Unit *(Units)* | 3 | 3 | 100 |
| 21 | Terwujudnya Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas *(Evaluation of Quality Budget Implementation)* | Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran *(Budget Implementation Evaluation Value)* | Nilai *(Score)* | 94 | 96,47 | 102,63 |
| 22 | Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual *(Reliable and Actual Information Management System)* | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan *(Percentage of Supervision Information System Utilization)* | Persen *(Percent)* | 95 | 100 | 76,57 |
| 23 | Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan *(Improvement of Supervision Services)* | Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu *(Percentage of Follow-Up Handling of Supervision Consultation on Time)* | Persen *(Percent)* | 85 | 100 | 117,65 |

## Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan
*Average Key Performance Accomplishment*

**106,02%**

# ITJEN DALAM ANGKA
# *INSPECTORATE GENERAL IN FIGURES*

## Capaian Kinerja Pengawasan Intern Tahun 2022
*Accomplishment of Internal Control Performance in 2022*

### Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
*Number of Supervision Activities*

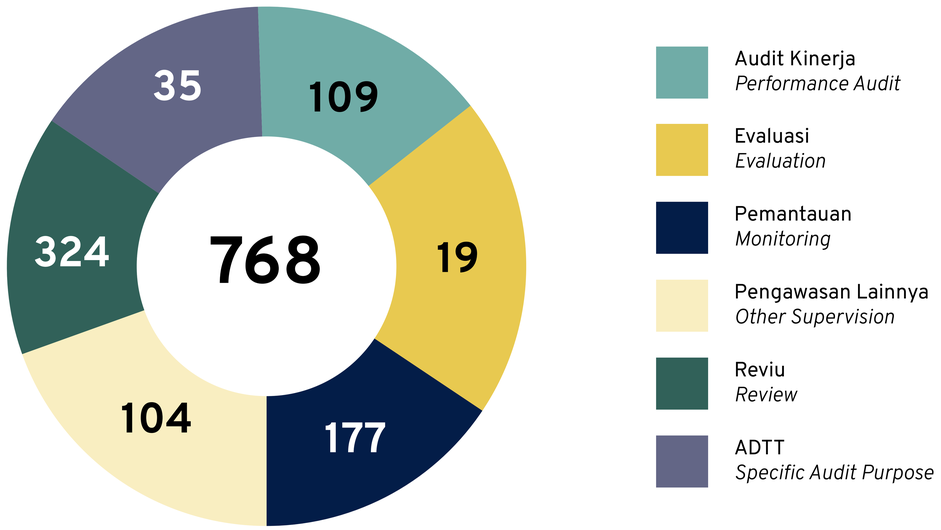


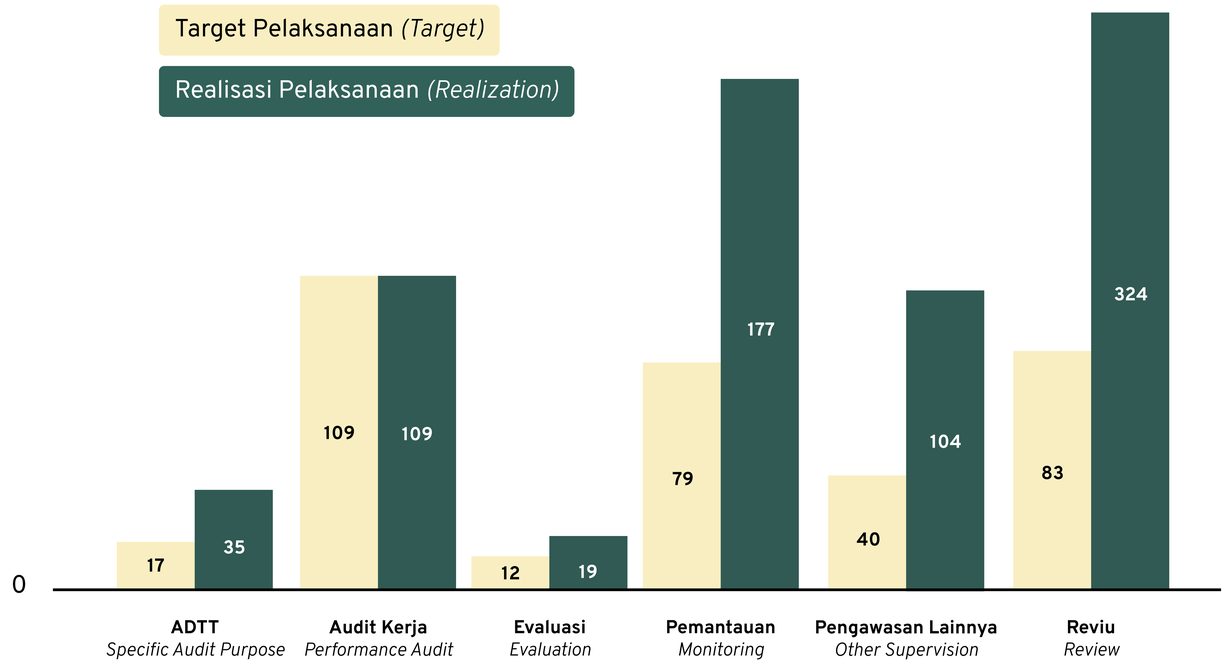


| Audit Kinerja *Performance Audit* | Evaluasi *Evaluation* | Pemantauan *Monitoring* | Pengawasan Lainnya *Other Supervision* | Reviu *Review* | ADTT *Specific Audit Purpose* |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 158% | 224% | 260% | 390% | 206% |

# Audit Kinerja *(Performance Audit)*

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dituntut meningkatkan kapabilitasnya dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah melalui hasil-hasil pengawasan yang pada akhirnya mampu memberi kontribusi bagi peningkatan aspek kinerja meliputi aspek efektif, efisien, dan ekonomis (3E) di organisasi. Audit kinerja bertujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis. Kegiatan audit kinerja berfokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

*As the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Inspectorate General of the Ministry of Transportation is required to increase its capabilities in order to improve government performance through supervision results which in the end are able to contribute to improving performance aspects including effective, efficient and economical (3E) aspects in the organization. Performance audit aims to obtain an adequate level of confidence in the audited performance report and improve performance on an ongoing basis by taking into account aspects of the effectiveness of the internal control system, compliance with laws and regulations and the principles of effective, efficient and economical. Performance audit activities focus on areas that are able to add value and have the potential for continuous improvement.*

## Realisasi Kegiatan Audit Kinerja Tahun 2022
*Performance Audit Realization in 2022*

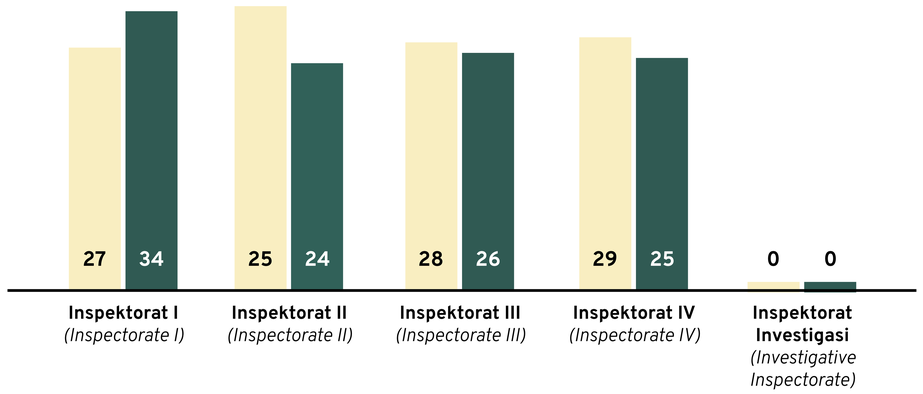


Pada tahun 2022, itjen telah melaksanakan kegiatan audit kinerja sebanyak 109 kegiatan dari rencana sebanyak 109 kegiatan sehingga capaiannya adalah 100%. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pengawasan tahun 2022 yang menerapkan Faktor Risiko dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022.

*In 2022, the IG has carried out 109 performance audit activities out of the planned 109 activities so that the achievement is 100%. This is in accordance with the 2022 supervisory policy which applies Risk Factors in the preparation of the 2022 Annual Supervision Work Program.*

## Audit Kinerja pada Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

Audit kinerja pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dalam rangka penerapan implementasi NLE. Tim audit kinerja melakukan Monitoring ke Terminal Multipurpose Teluk Lamong untuk secara langsung melihat perkembangan penerapan layanan pelabuhan Terminal Teluk Lamong atas 8 indikator Layanan utama Kepelabuhan diantaranya:

1. SSM Pengangkut
2. SSM Quarantine & Custom
3. Autogate
4. DO Online
5. SP2 Online
6. Utilitas Vessel Domestik
7. Trucking
8. Payment

Hasil dari kegiatan Monitoring, bertujuan untuk mendukung iklim usaha khususnya di Jawa Timur pada Terminal Teluk Lamong yang masuk wilayah kerja Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

## *Performance Audit at Tanjung Perak Main Port Authority*

*The Performance Audit at the Main Port Authority Office of Tanjung Perak, East Java Province, were carried out in the context of implementing the NLE. The Inspectorate Team conducts monitoring of the Teluk Lamong Multipurpose Terminal to directly see the development of the implementation of the Teluk Lamong Terminal port services on 8 main port service indicators including:*

1. *SSM Carrier*
2. *SSM Quarantine & Custom*
3. *Autogate*
4. *DO Online*
5. *SP2 Online*
6. *Domestic Vessel Utilities*
7. *Trucking*
8. *Payment*

*The results of monitoring activities aim to support the business climate, especially in East Java at the Teluk Lamong Terminal which is included in the working area of the Tanjung Perak Main Port Authority.*

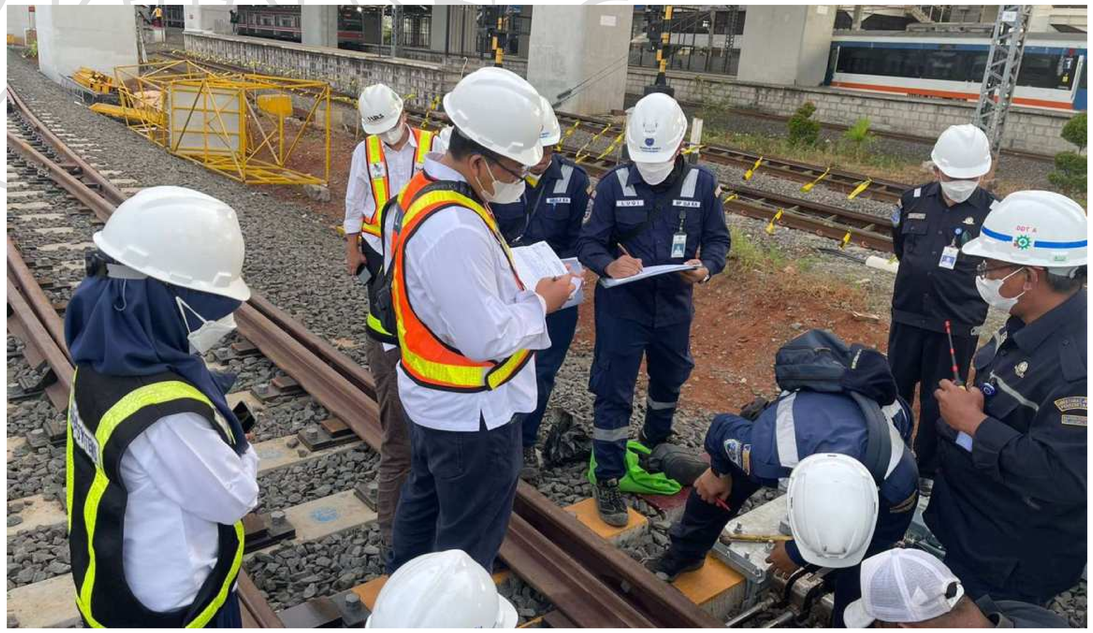

## Audit Kinerja pada Balai Pengujian Kereta Api Jawa Barat

Audit Kinerja pada Balai Pengujian Perkeretaapian di Provinsi Jawa Barat meliputi kegiatan pengujian sarana di Dipo KRL Depok terkait uji statis yang terbagi dalam dua pengerjaan, yaitu pekerjaan bawah (pengukuran diameter roda, pengecekan pengiriman dan pengecekan tinggi *coupler)* terhadap permukaan rel dan pengerjaan atas (pengecekan temperatur, pengecekan kebisingan dan pengecekan ruang kendali pengemudi) serta uji dinamis meliputi pengecekan yang dilakukan dengan menjalankan KRL. Selanjutnya melaksanakan pengujian prasarana di Stasiun Manggarai terkait uji rancang bangun dokumen, uji rancang bangun fisik dan uji fungsi yang diterapkan dalam pengujian Fasilitas Operasi (Fasop) Sistem Persinyalan serta Listrik Aliran Atas (LAA).

## *Performance Audit at the Railway Testing Center West Java*

*Testing of the facilities at the Depok KRL Depot, namely the Static Test which is divided into two processes, namely the bottom work (measurement of wheel diameter, checking braking and checking the height of the coupler against the rail surface and working on top (checking temperature, checking noise and checking the driver's control room) as well as the Dynamic Test including checking carried out by running the KRL As well as the implementation of infrastructure testing at Manggarai Station including Document Design Tests, Physical Design Tests and Functional Tests which are applied in testing the Operational Facilities (Fasop) Signaling Systems and Overflow Electricity (LAA).*

## Audit Kinerja Peningkatan Jalur KA Padang-Pariaman dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus

Audit kinerja di kota Padang provinsi Sumatera Barat untuk meninjau paket-paket pekerjaan Peningkatan Jalur KA Padang - Pariaman. Kegiatan milik Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Barat ini memiliki sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kegiatan yang terdiri dari sterilisasi jalur kereta api dan peningkatan sarana prasarana kereta ini diharapkan dapat membangkitkan transportasi kereta api di Pulau Sumatera.

Pengawasan dilanjutkan pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus Tahap III. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan akses menuju Kepulauan Mentawai yang memiliki potensi besar terhadap pariwisata dan hasil alamnya. Tim audit kinerja juga melaksanakan *sharing session* yang dihadiri oleh para Kepala UPT di Provinsi Sumatera Barat. Tim menekankan pentingnya koordinasi, tidak hanya antara UPT Kementerian Perhubungan namun juga dengan Kementerian lainnya dan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat.

## *Performance Audit of the Padang-Pariaman Railway Line and Development of the Bungus Bay Crossing Port*

*Performance audit in the city of Padang, West Sumatra province to review work packages for the Improvement of the Padang - Pariaman Railway Line. This activity, owned by the West Sumatra Railway Engineering Center, has a source of funds from State Sharia Securities (SBSN). This activity, which consists of sterilizing railroad tracks and improving train infrastructure, is expected to revive rail transportation on the island of Sumatra.*

*Supervision continued on the Development of the Bungus Bay Ferry Port Phase III. This activity is one of the government's efforts to increase access to the Mentawai Islands which have great potential for tourism and their natural products. The performance audit team also carried out a sharing session which was attended by UPT Heads in West Sumatra Province. The team stressed the importance of coordination, not only between the UPT of the Ministry of Transportation but also with other ministries and local regional governments to be able to solve existing problems quickly.*

## Audit Kinerja pada KSOP Kelas II Cirebon

Kegiatan audit kinerja pada Kantor KSOP Kelas II Cirebon merupakan salah satu tugas dan fungsi Itjen sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Kualitas) terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tata kelola, tugas pokok, dan fungsi organisasi serta memberikan nilai tambah untuk peningkatan kinerja pada unit kerja.

Inspektorat Jenderal berperan sebagai *Strategic Partner* dan *Trusted Advisor* bagi unit kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Unit kerja dapat berkonsultasi terkait permasalahan/kendala yang dihadapi untuk diberikan solusi/rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya tim audit kinerja melakukan peninjauan ke area Pelabuhan Cirebon dan peninjauan Kapal Patroli milik KSOP Kelas II Cirebon.

## *Performance Audit on KSOP Class II Cirebon*

*Performance audit activities at the KSOP Class II Cirebon Office are one of the duties and functions of the Inspectorate General as Quality Assurance for the implementation of activities under laws and regulations concerning governance, main tasks and organizational functions as well as providing added value for improving performance in the work unit.*

*The Inspectorate General acts as a Strategic Partner and Trusted Advisor for work units in carrying out work. Work units can consult regarding problems/obstacles faced to provide solutions/ recommendations under applicable laws and regulations. Furthermore, the performance audit team conducted a review of the Cirebon Harbor area and a patrol boat belonging to KSOP Class II Cirebon.*

## Audit Kinerja di Sorong, Papua Barat

Tim audit kinerja melaksanakan *sharing session* bersama Kepala UPT di Provinsi Papua Barat membahas tentang capaian program kerja semester 1 serta kendala yang dihadapi. Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi kegiatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak, pembangunan *drainase* pada kantor UPBU DEO Sorong serta meninjau kapal navigasi yang tidak beroperasi karena rusak berat pada Dermaga Distrik Navigasi Sorong.

Selanjutnya tim audit kinerja melakukan koordinasi di kantor BPTD Papua dan Papua Barat membahas tata kelola BPTD Papua dan Papua Serta kegiatan pembangunan 3 (tiga) Dermaga Penyeberangan Batanta, Klademak, Salawati, dan pembangunan Terminal Barang Skouw. Tim audit kinerja juga melakukan pengawasan pada pembangunan gedung *dormitory* dan sarana ibadah di Poltekpel Sulawesi Utara. Kegiatan audit kinerja ditutup dengan Rapat Koordinasi pada Kantor BPTD Sulawesi Utara terkait beberapa kegiatan diantaranya: Subsidi Angkutan Perintis KSPN, progres Rehabilitasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Likupang, Pembangunan Terminal Bolaang Mongondow, dan Terminal Tipe A Liwas yang belum beroperasi.

## *Performance Audit in Sorong, West Papua*

*The performance audit team conducted a sharing session with the UPT Head in West Papua Province to discuss the achievements of the 1st-semester work program and the obstacles encountered. The activity continued with visiting the construction activities of the Klademak Ferry Port, construction of drainage at the UPBU DEO Sorong office and observing navigation ships that were not operating due to heavy damage at the Sorong Navigation District Pier.*

*Furthermore, the performance audit team coordinated at the Papua and West Papua BPTD offices to discuss the management of the Papua and Papua BPTD as well as the development activities of 3 (three) Batanta, Klademak, Salawati Ferry Piers, and the construction of the Skouw Freight Terminal. The performance audit team also supervised the construction of dormitory buildings and worship facilities at the North Sulawesi Poltekpel. The performance audit activity was closed with a Coordination Meeting at the North Sulawesi BPTD Office regarding several activities including Subsidy for KSPN Pioneer Transportation, the progress of the Rehabilitation of the Construction of the Likupang Crossing Port, Construction of the Bolaang Mongondow Terminal, and the Type A Liwas Terminal which has not yet been operating.*

## Audit Kinerja di Sulawesi Tengah

Tim audit kinerja melaksanakan *sharing session* bersama para Kepala Kantor terkait program kerja serta kegiatan pembangunan dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya tim audit kinerja Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Kantor UPBU Sis Al-Jufri Palu, BPTD Sulawesi Tengah, KSOP Teluk Palu, UPBU Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, UPP Luwuk, Pelabuhan Pantoloan, dan Pelabuhan Wani.

## *Performance Audit at Central Sulawesi*

*The performance audit team carried out sharing sessions with Office Heads regarding work programs and development activities and the constraints encountered. Furthermore, the Inspectorate General's performance audit team carried out supervision in the Central Sulawesi Province area at the UPBU Sis Al-Jufri Palu Office, BPTD Central Sulawesi, KSOP Teluk Palu, UPBU Thanksgiving Aminuddin Amir Luwuk, UPP Luwuk, Pantoloan Port, and Wani Port.*

# Audit dengan Tujuan Tertentu *(Specific Audit Purpose)*

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit kinerja terhadap permasalahan yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi, baik ADTT terprogram maupun tidak terprogram. Pada tahun 2022, itjen telah melaksanakan kegiatan ADTT sebanyak 35 kegiatan dari rencana sebanyak 17 kegiatan sehingga capaiannya adalah 206%.

*Audits with Specific Purposes (ADTT) are audits conducted with specific objectives other than performance audits on issues that are the focus of attention of organizational leaders, both programmed and non-programmed ADTT. In 2022, the IG has carried 35 ADTT activities out of the planned 17 activities so the achievement is 206%.*

**Realisasi Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu 2022**
*Realization of Specific Audit Purpose in 2022*

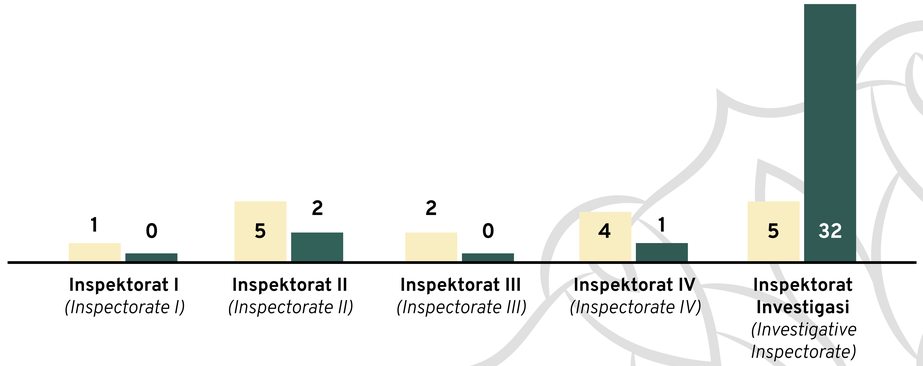

## ADTT Sistem Aplikasi INAPORTNET pada KSOP Kelas I Panjang

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Kapal melalui sistem InaPortnet, Tim Audit melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di beberapa wilayah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang telah menggunakan sistem InaPortnet. Tim audit ikut serta memantau sistem aplikasi InaPortnet di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang.

Tim audit menyampaikan 3 prinsip dari sistem aplikasi InaPortnet, yaitu: *cashless*, *paperless*, dan *contactless* agar sistem aplikasi InaPortnet dapat berjalan optimal dan terhindar dari potensi fraud. Disampaikan juga pentingnya pemutakhiran aplikasi InaPortnet kedepannya agar dapat terintegrasi melalui sistem kepelabuhan lainnya. Tim audit juga menghimbau untuk pelaksanaan pelayanan kapal melalui InaPortnet harus berpegang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui InaPortnet.

## *ADTT INAPORTNET Application System in KSOP Class I Panjang*

*To optimize ship services through the InaPortnet system, the Audit Team conducted an Audit with a Specific Purpose (ADTT) in several areas of the Port Authority and Harbor Authority Offices that have used the InaPortnet system. The audit team participated in monitoring the InaPortnet application system at the Class I Panjang Port Authority Office.*

*The audit team conveyed 3 principles of the InaPortnet application system, namely: cashless, paperless, and contactless so that the InaPortnet application system can run optimally and avoid potential fraud. He also conveyed the importance of updating the InaPortnet application in the future so that it can be integrated through other port systems. The audit team also appealed for the implementation of ship services through InaPortnet to adhere to the Minister of Transportation Regulation Number 8 of 2022 concerning Procedures for Ship Services Through InaPortnet.*

## ADTT pada UPP Kelas II Bulukumba

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan audit dengan tujuan tertentu di UPP Kelas II Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Tim audit melaksanakan uji petik pada pembangunan Pelabuhan Laut Kajang.

## *ADTT at UPP Class II Bulukumba*

*In the context of carrying out audit activities with specific objectives at UPP Class II Bulukumba, South Sulawesi Province, the audit team carried out a sampling test on the construction of the Kajang Seaport.*

# Reviu *(Review)*

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Sebagai contoh reviu laporan keuangan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada tahun 2022, itjen telah melaksanakan kegiatan reviu sebanyak 324 kegiatan dari rencana sebanyak 83 kegiatan sehingga capaiannya adalah 390%.

*A review is a review of the evidence of an activity to provide limited assurance that the activity has been carried out under the provisions, standards, plans or norms that have been determined. For example, a review of financial statements is an activity carried out to provide limited assurance that the financial statements have been prepared based on an adequate internal control system and are presented under Government Accounting Standards (SAP). In 2022, the IG has carried 324 review activities out of the planned 83 activities so the achievement is 390%.*

**Realisasi Kegiatan Reviu Tahun 2022**
*Review Realization in 2022*

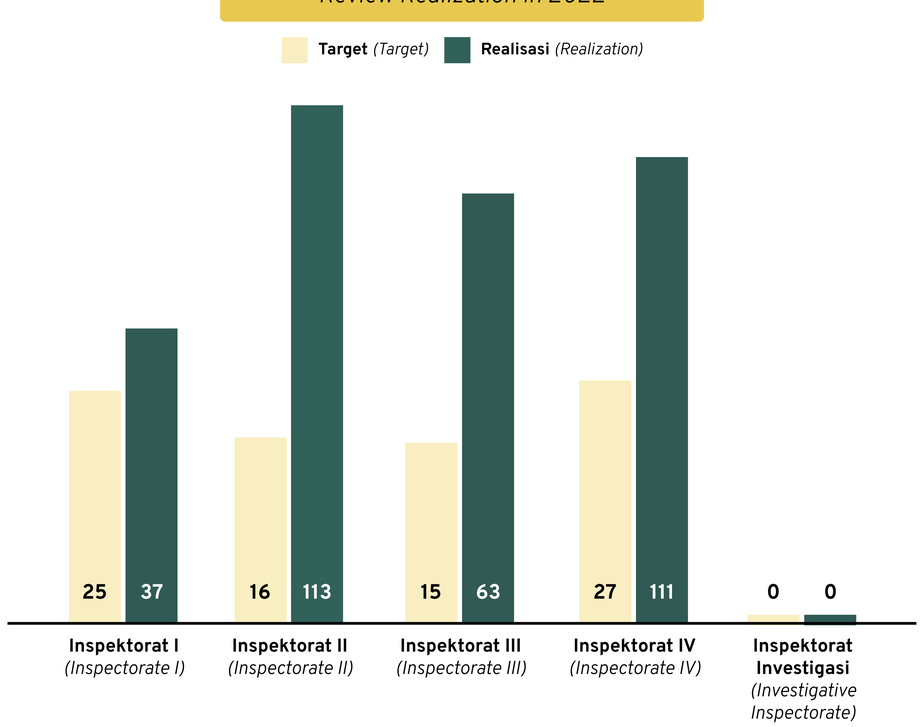

## Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Balai Teknik Perkeretaapaian Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung upaya Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang diatur dalam PMK 17/pmk.09/2019, tim reviu melakukan cek fisik reviu pada Balai Teknik Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan diawali rapat bersama dengan tim BTP Jawa Bagian Tengah dan pemaparan atas hasil sementara Reviu PIPK. Selanjutnya tim reviu melakukan visit ke salah satu Lokasi Pembangunan Proyek Strategis pada BTP Jawa Bagian Tengah, yaitu pada Pembangunan Jalur Kereta Api Reaktivasi Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas. Pada kunjungannya kali ini, tim reviu berharap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan benar-benar diterapkan dengan baik.

## *Review of Internal Control of Financial Reporting at the Central Java Railway Engineering Center*

*To support efforts to improve the quality of internal control over financial reporting as regulated in PMK 17/pmk.09/2019, the review team conducted a physical check of the review at the Central Java Railway Engineering Center.*

*The activity began with a joint meeting with the Central Java BTP team and a presentation of the interim results of the PIPK Review. Furthermore, the review team conducted a visit to one of the Strategic Project Development Locations in the Central Java BTP, namely the Semarang Tawang Reactivation Railroad Development - Tanjung Emas Port. During this visit, the review team hopes that Internal Control over Financial Reporting will be implemented properly.*

## Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAKPA/B di KSOP Kelas III Lembar

Dalam rangka Persiapan Pelaporan Keuangan TA 2022, Tim Koordinator Reviu Laporan Keuangan melaksanakan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAKPA/B pada Provinsi Nusa Tenggara Barat bertempat di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KSOP Kelas III Lembar dilanjutkan paparan oleh Tim Koordinator Reviu Laporan Keuangan terkait Reviu LK dan tugas fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal yang bersifat assurance dan consulting. Tim Koordinator Reviu Laporan Keuangan mengharapkan dengan adanya Reviu Laporan Keuangan ini maka Laporan Keuangan pada satker wilayah dapat disajikan secara handal dan akurat serta dapat memberikan kontribusi dalam penilaian WTP Kementerian Perhubungan.

## *Annual Financial Report Review in KSOP Class III Lembar*

*In preparation for Financial Reporting for FY 2022, the Financial Report Review Coordinator Team carried out the UAKPA/B Level Annual Financial Report Review Activity in West Nusa Tenggara Province at the Syahbandar Office and KSOP Class III Lembar.*

*The activity was opened by the Head of KSOP Class III Lembar followed by a presentation by the Financial Statement Review Coordinating Team related to the LK Review and the duties of the Inspectorate General's Oversight function which are assurance and consulting in nature. The Coordinating Team for the Financial Report Review hopes that with this Financial Report Review, the Financial Reports for regional work units can be presented reliably and accurately and can contribute to the Ministry of Transportation's WTP assessment.*

# **Evaluasi** *(Evaluation)*

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi harus menentukan sasaran yang mencakup antara lain : kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penanganan Benturan Kepentingan. Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi langkah-langkah kerja yang meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/ dokumen, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi. Pada tahun 2022, itjen telah melaksanakan kegiatan evaluasi sebanyak 19 kegiatan dari rencana sebanyak 12 kegiatan sehingga capaiannya adalah 158%.

*To support efforts to improve the quality of internal control over financial reporting as stipulated in PMK 17/pmk.09/2019, the review team conducted a physical check of the review at the Central Java Province Railway Engineering Center.*

*The activity began with a joint meeting with the Central Java BTP team and a presentation of the interim results of the PIPK Review. Furthermore, the review team conducted a visit to one of the Strategic Project Development Locations in the Central Java BTP, namely the Semarang Tawang Reactivation Railroad Development - Tanjung Emas Port. During this visit, the review team hopes that Internal Control over Financial Reporting will be implemented properly.*

**Realisasi Kegiatan Evaluasi Tahun 2022**
*Evaluation Realization in 2022*

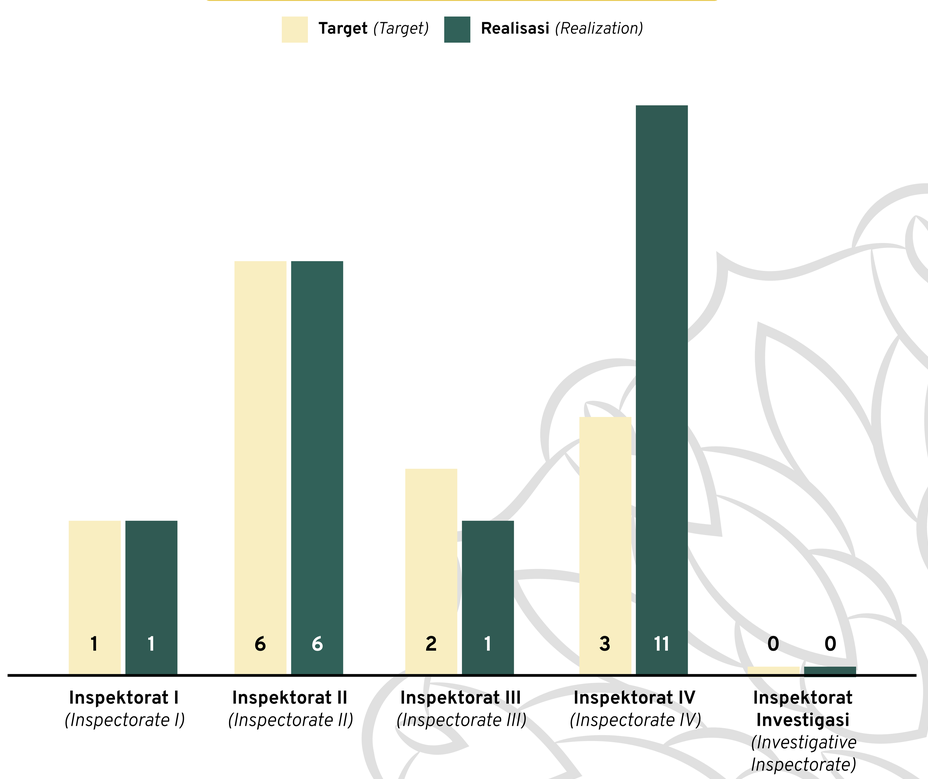

## Evaluasi Aksi STRANAS-PK pada Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

Dalam rangka menindaklanjuti catatan evaluasi capaian dan percepatan implementasi aksi STRANAS-PK (B-18), tim evaluasi Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan monitoring atas capaian tindak lanjut pada Pelabuhan Belawan Sumatera Utara. Mengawali kegiatan ini, tim evaluasi terlebih dahulu memberikan paparan dan arahan terkait percepatan target aksi STRANAS-PK. Selanjutnya tim evaluasi melakukan pemantauan langsung terhadap Single Truck Identity (STID) pada *Customer Care Center* Pelindo, penerapan Autogate System, ruang *Command Center Monitoring Delivery Order* (DO) Online dan (SP2) Online, SIMON TKBM serta tinjauan pada Terminal Peti Kemas milik PT. Pelindo dan Terminal Petikemas yang dikelola oleh PT. Prima Petikemas.

Tim evaluasi juga menyempatkan untuk meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, serta meminta penjelasan terkait proses bisnis joint inspection kepada petugas Bea Cukai dan Balai Karantina Pertanian. Dengan terimplementasinya indikator capaian pada pelabuhan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola area pelabuhan yang berdampak positif bagi penurunan biaya logistik dan pemangkasan waktu birokrasi, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

## *Evaluation of STRANAS-PK Actions at the Belawan Main Port Authority*

*To follow up on the achievement evaluation record and accelerate the implementation of the STRANAS-PK action (B-18), the Inspectorate General's evaluation team conducted monitoring and monitoring of the follow-up achievements at Belawan Port, North Sumatra. Starting this activity, the evaluation team first gave explanations and directions regarding the acceleration of the STRANAS-PK action targets. Furthermore, the evaluation team conducted direct monitoring of the Single Truck Identity (STID) at the Pelindo Customer Care Center, the implementation of the Autogate System, the Command Center room for monitoring Delivery Orders (DO) Online and (SP2) Online, SIMON TKBM and a review of the Container Terminal belonging to PT. Pelindo and Container Terminal managed by PT. Prima Container.*

*The evaluation team also took the time to review the Graha Segara Integrated Physical Inspection Site (TPFT), as well as ask for an explanation regarding the joint inspection business process from the Customs and Excise officers and the Agricultural Quarantine Center. With the implementation of the achievement indicators at the port, it is hoped that it can improve the quality of service and governance of the port area which has a positive impact on reducing logistics costs and reducing bureaucratic time, as mandated by Presidential Regulation Number 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention.*

## Evaluasi Zona Integritas Wilayah Makassar

Dalam rangka Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tim evaluasi monitoring dan pendampingan untuk mempersiapkan unit kerja yang akan mengikuti evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

Adapun monitoring dan pendampingan dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah V Makassar dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dan beberapa unit kerja lainnya yang masuk seleksi administrasi Zona Integritas WBK dan WBBM Tahun 2022. Unit kerja tersebut diharapkan dapat memperoleh predikat WBK WBBM oleh Kementerian PAN dan RB.

## *Evaluation of the Makassar Region Integrity Zone*

*In the framework of the Evaluation of the Development of the Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Malayani Bureaucratic Area by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, the monitoring and assistance evaluation team is to prepare work units that will take part in the evaluation by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.*

*Monitoring and assistance are carried out at the Makassar Region V Airport Authority Office and the Makassar Main Kesyahbandaran Office and several other work units that are included in the administration selection for the 2022 WBK and WBBM Integrity Zone. These work units are expected to be awarded the WBK WBBM title by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.*

# **Pemantauan** *(Monitoring)*

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh dari kegiatan pemantauan adalah Monitoring Pengendalian Transportasi Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang dilaksanakan Itjen sesuai dengan sesuai Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 7 Tahun 2022. Pada tahun 2022, itjen telah melaksanakan kegiatan pemantauan sebanyak 177 kegiatan dari rencana sebanyak 79 kegiatan sehingga capaiannya adalah 224%.

*Monitoring is the process of assessing the progress of a program or activity in achieving the stated goals. An example of monitoring activities is Monitoring Transportation Control During the Christmas 2022 and New Year 2023 Transportation Period which was carried out by the Inspectorate General following the Instruction of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number IM 7 of 2022. In 2022, the IG has carried out monitoring activities of 177 activities from the planned as many as 79 activities so that the achievement is 224%.*

## Realisasi Kegiatan Pemantauan Tahun 2022
*Monitoring Realization in 2022*

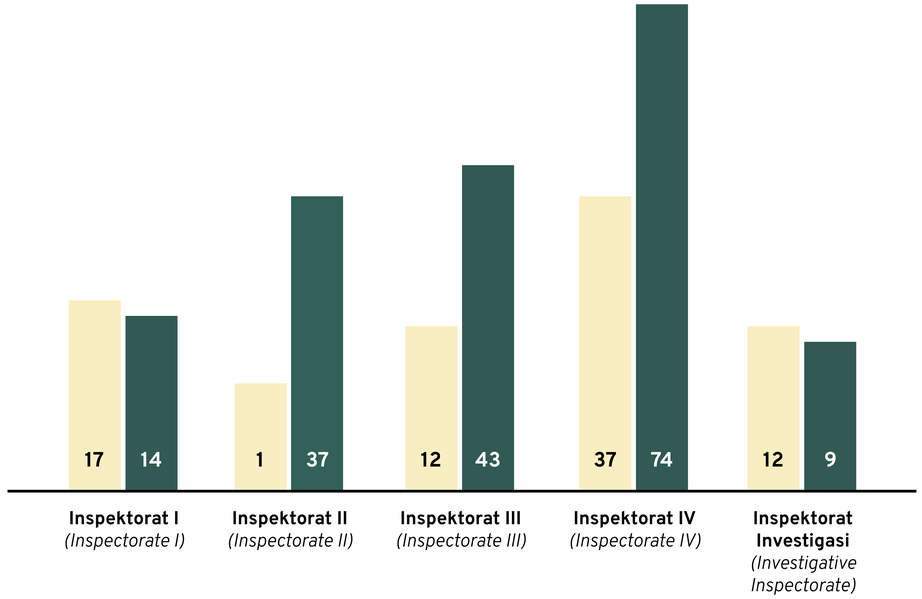

## Pemantauan Malam Pergantian Tahun Baru 2022 - 2023

Mewakili Bapak Menteri Perhubungan, Inspektur Jenderal menghadiri undangan Pemantauan Sitkamtibmas Malam Pergantian Tahun Baru 2023. Acara dilaksanakan di gedung Promoter Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Kepala BMKG, BNPB, dan Pejabat Utama Mabes Polri. Melalui teleconference dilakukan monitoring kesiapan Nataru di sejumlah provinsi, dari laporan masing masing daerah, kondisi Sitkamtibmas terpantau berjalan aman dan terkendali.

## *New Year's Eve Monitoring 2022-2023*

*Representing the Minister of Transportation, the Inspector General attended the invitation to Monitoring Sitkamtibmas New Year's Eve 2023. The event was held at the Polda Metro Jaya Promoter building and was attended by the National Police Chief, TNI Commander, Head of BMKG, BNPB, and Main Officials of Police Headquarters. Through teleconferences, monitoring of Nataru readiness was carried out in several provinces, from the reports of each region, Sitkamtibmas conditions were monitored to be running safely and under control.*

## Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Semarang Provinsi Jawa Tengah

Tim Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan Natal 2022 dan Tahun baru 2023 di Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pemantauan Nataru di Semarang meliputi :

1. Terminal Tipe A Mangkang
2. Bandara Ahmad Yani
3. Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol
4. Pelabuhan Tanjung Emas

Pada pelaksanaan pemantauan ini itjen memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran selama pelaksanaan angkutan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

## *Monitoring Christmas and New Year 2022-2023 in Semarang, Central Java Province*

*The Inspectorate General Team monitored Christmas 2022 and New Year 2023 in Semarang, Central Java Province. The implementation of Nataru monitoring in Semarang includes:*

*1. Terminal Type A Mangkang*
*2. Ahmad Yani Airport*
*3. Tawang and Poncol Train Stations*
*4. Port of Tanjung Emas*

*In carrying out this monitoring, the Inspectorate General ensures that all activities have been carried out under the SOP to ensure security, safety and smooth operation during the 2022 Christmas and 2023 New Year transportation.*

## Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Danau Toba

Tim pemantauan Itjen melakukan Kegiatan Monitoring Natal 2022 dan Tahun baru 2023 di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan monitoring Nataru di Danau Toba meliputi :

1. Bandar Udara Internasional Silangit
2. KSOPP Danau Toba
- Pelabuhan Ajibata
- Pelabuhan Tigaras
- Pelabuhan Marau
- Pelabuhan Ambarita

Pada pelaksanaan pemantauan monitoring ini tim pemantauan itjen memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran selama pelaksanaan angkutan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

## *Monitoring Christmas and New Year 2022-2023 on Lake Toba*

*The Inspector General's monitoring team carried out Monitoring Activities for Christmas 2022 and New Year 2023 at Lake Toba, North Sumatra Province. The implementation of Nataru monitoring on Lake Toba includes:*

1. *Silangit International Airport*
2. *KSOPP Lake Toba*
- *Ajibata Harbor*
- *Tigaras Port*
- *Marau Harbour*
- *Ambarita Harbour*

*In carrying out this monitoring, the IG monitoring team ensures that all activities have been carried out following the SOP to ensure security, safety and smooth operation during the Christmas 2022 and 2023 New Year transportation.*

### Pemantauan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 di Pelabuhan Penyeberangan Merak

Inspektur Jenderal M Pramintohadi Sukarno didampingi oleh tim pemantauan Itjen melakukan monitoring angkutan Nataru 2022 pada Pelabuhan Penyeberangan Merak. Bertempat di ruang rapat PT. ASDP, Inspektur Jenderal melakukan pertemuan dengan Stakeholder terkait (KSOP Banten, BPTD Wil VII Banten, PT. ASDP, dan BMKG).

Dalam kunjungan tersebut Inspektur Jenderal melakukan peninjauan ke Posko Gabungan, Dermaga V, dan Dermaga IV Executive. Kondisi Dermaga V saat ini sedang dilakukan perbaikan. Inspektur Jenderal juga mengecek penggunaan Vending Machine untuk pencetakan Boarding Pass penumpang. Selama monitoring kondisi pelabuhan Merak dalam posisi terkendali namun ada antrian kendaraan pribadi yang akan menyeberang pada Terminal Executive.

### *Monitoring Christmas and New Year 2022-2023 at the Merak Crossing Port*

*Inspector General M Pramintohadi Sukarno accompanied by the monitoring team of the Inspectorate General carried out monitoring of the Nataru 2022 transport at the Merak Ferry Port. Located in the meeting room of PT. ASDP, Inspector General held meetings with related Stakeholders (KSOP Banten, BPTD Wil VII Banten, PT. ASDP, and BMKG).*

*During the visit, the Inspector General conducted a visit to the Joint Post, Pier V, and Pier IV Executive. The condition of Pier V is currently being repaired. The Inspector General also checks the use of vending machines for printing passenger boarding passes. During monitoring the condition of the Merak port is in a controlled position but there is a queue of private vehicles that will cross the Executive Terminal.*

## Pengawasan Lainnya *(Other Supervisions)*

Pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan asistensi dan konsultasi, meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui peer review (telaah sejawat). Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, itjen terlebih dahulu menentukan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Pada tahun 2022, itjen telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sebanyak 104 kegiatan dari rencana sebanyak 40 kegiatan sehingga capaiannya adalah 260%.

*Other supervision is an activity that does not provide quality assurance but rather provides assistance and consulting services, including outreach, assistance, and consulting technical guidance in the field of supervision and improving the quality of supervision results through peer review. In carrying out other supervisory activities, the IG first determines topics or discussion materials that are strategic in nature, contain high risks/vulnerabilities and have a direct impact on the community. In 2022, the Inspectorate General has carried out other monitoring activities of 104 activities out of the planned 40 activities so that the achievement is 260%.*

**Realisasi Kegiatan Pengawasan Lainnya Tahun 2022**
*Other Supervision Realization in 2022*

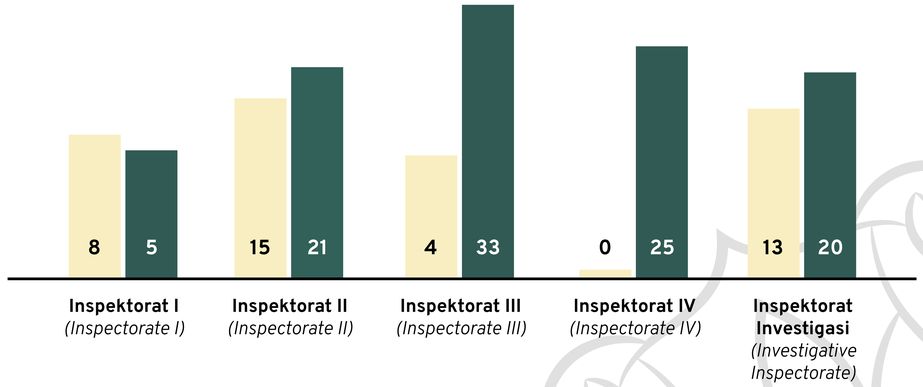

## *Pengawasan Pelepasan Kapal Perintis Type GT 2000 KM. Sabuk Nusantara 89 di Pontianak*

Mewakili Inspektur Jenderal, Inspektur IV Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H. turut menghadiri Pelepasan Kapal Perintis Type GT 2000 KM. Sabuk Nusantara 89 menuju Pangkalan Perintis Wani oleh Menteri Perhubungan di Dermaga Galangan PT. Steadfast Marine Pontianak.

Menteri Perhubungan hadir di Galangan Kapal Steadfast bersama Ketua Komisi V Lasarus dan Staf khusus Menhub Adita Irawati. Setelah menerima penjelasan terkait operasional kapal dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla, rombongan menaiki dan melihat langsung kondisi ruangan-ruangan dan anjungan kapal serta berbicara dengan awak kapal, operator dan pemilik galangan kapal.

Kapal milik Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, ini akan digunakan untuk rute Angkutan Laut Perintis R-47 dengan Homebase Pelabuhan Wani. Sebelum kedatangan Menhub dan rombongan, telah dilaksanakan official sea trial dalam rangka pemenuhan sertifikasi dan dokumentasi baik secara statutory dan class matter kelaiklautan kapal, serta kontrak kapal dengan Satker Ditlala.

## *Supervision of the Discharge of the Pioneer Vessel Type GT 2000 KM. Nusantara Belt 89 in Pontianak*

*Representing the Inspector General, Inspector IV Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H. also attended the Launching of the Type GT 2000 KM Pioneer Ship. Belt Nusantara 89 to the Wani Pioneer Base by the Minister of Transportation at PT. Steadfast Marine Pontianak.*

*The Minister of Transportation was present at the Steadfast Shipyard with the Chairman of Commission V Lasarus and Special Staff of the Minister of Transportation Adita Irawati. After receiving an explanation regarding the ship's operations from the Director of Traffic and Sea Transport of the Directorate General of Transportation, the group boarded and saw firsthand the condition of the rooms and bridges of the ship and spoke with the ship's crew, operators and shipyard owners.*

*The vessel belonging to the Central Sea Transport Traffic Safety Improvement Work Unit will be used for the R-47 Pioneer Sea Transportation route with the Wani Port Homebase. Before the arrival of the Minister of Transportation and his entourage, an official sea trial had been carried out to fulfil certification and documentation both in statutory and class matter seaworthiness of the ship, as well as the shipping contract with the Ditlala Working Unit.*

## Konsultasi Kebijakan *Bus Rapid Transit* dengan Konsep *Buy the Service*

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawsan lainnya dilaksanakan kegiatan Konsultasi kebijakan Bus Rapid Transit dengan konsep Buy the Service (BTS). Itjen menyampaikan agar seluruh prosedur dilaksanakan dengan baik di lapangan, misalnya penegakan hukum truk ODOL, pemberian subsidi, dan kerjasama dengan pihak lain.

Itjen juga berpesan agar memetakan masalah yang bersifat makro karena Itjen siap memberikan dukungan untuk perbaikan kinerja yang dibutuhkan sehubungan peran pengawasan intern dalam mewujudkan APIP sebagai strategic partner dan trusted advisor.

## *Bus Rapid Transit Policy Consultation with Buy the Service Concept*

*In the framework of carrying out other monitoring activities, a Bus Rapid Transit policy consultation activity with the Buy the Service (BTS) concept is carried out. The Inspector General conveyed that all procedures were carried out properly in the field, for example, enforcement of the ODOL truck law, granting subsidies, and cooperating with other parties.*

*The Inspectorate General also advised mapping macro problems because the Inspectorate General is ready to provide support for performance improvements needed in connection with the role of internal control in realizing APIP as a strategic partner and trusted advisor.*

## Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti
## *(Follow Ups to Oversight Outcomes Recommendations)*

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa rekomendasi policy recommendation, rekomendasi hukuman disiplin, dan rekomendasi hasil pengawasan selain policy recommendation. Persentase Temuan LHA Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90,57% dari target kinerja sebesar 86% sehingga persentase realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 105,31%.

*The percentage of follow-ups to oversight outcomes recommendations is the measurement of follow-up actions taken based on oversight conducted by the Inspectorate General. The follow-up actions are in the form of policy recommendations, disciplinary punishment recommendations, and recommendations on audit outcomes other than policy recommendations. The percentage of LHA Inspectorate General findings that are followed up in 2022 exceeds the target set, which is 90.57% of the performance target of 86% so that the percentage of actual performance achievements in 2022 is 105.31%.*

Rekapitulasi Data Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Posisi Per Januari 2023
*Recapitulation of Audit Results Data*

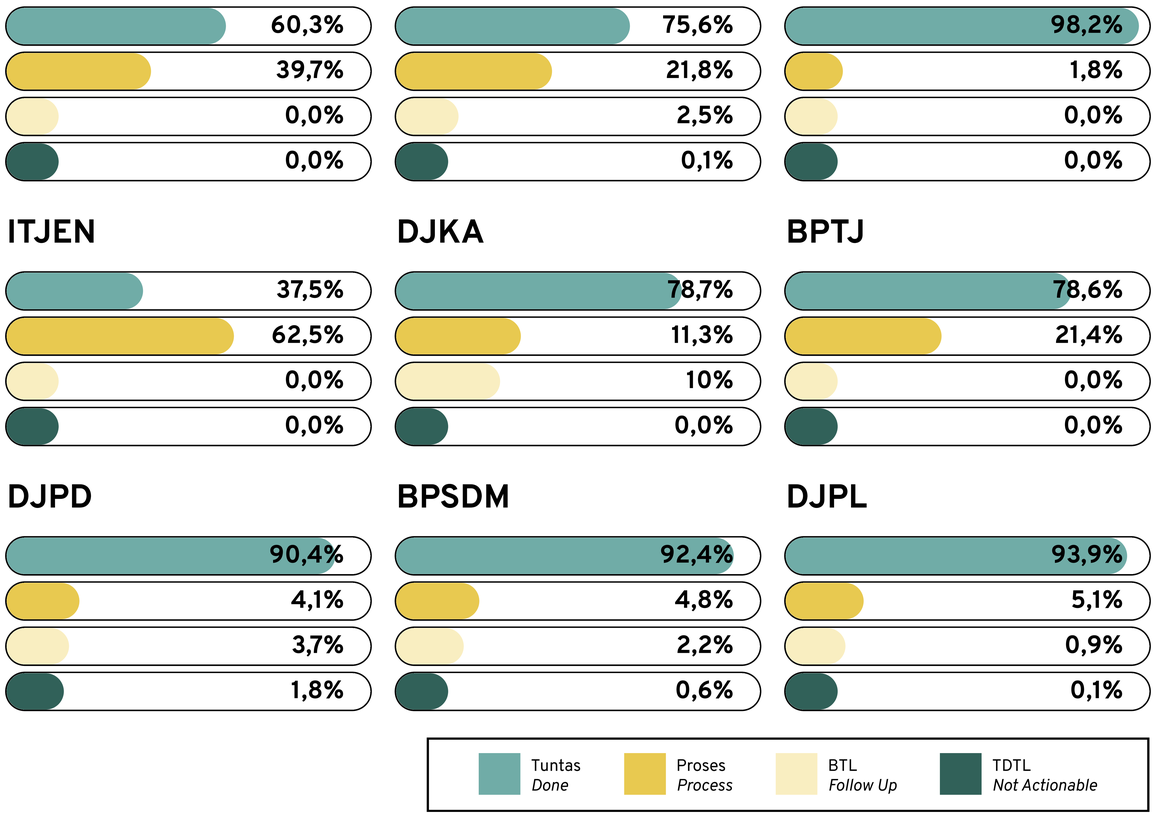


## Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
## *(Percentage of Follow-Up Complaints within the Ministry of Transportation)*

Upaya pencegahan fraud sepanjang 2022 dilakukan dengan pemetaan risiko fraud atas proses bisnis di beberapa eselon I. Peta risiko tersebut akan digunakan untuk meningkatkan awareness dari pelaksanaan kegiatan, UKI, dan Itjen dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian fraud.

Itjen juga secara aktif mengelola saluran pengaduan melalui aplikasi whistleblowing (SIMADU) yang merupakan aplikasi Whistleblowing System (WBS) Kementerian Perhubungan untuk memproses pengaduan dan pemberian informasi oleh whistleblower sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tingkat capaian verifikasi terhadap persentase tindak lanjut pengaduan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar 131,94% atau dari target 87% yang telah terealisasi sebanyak 100% laporan pengaduan. Pengaduan masyarakat yang masuk selama tahun 2022 berjumlah 148 pengaduan dimana sebagian besar pengaduan telah ditangani (status selesai).

*Efforts to prevent fraud throughout 2022 will be carried out by mapping the fraud risk of business processes in several echelon I. This risk map will be used to increase awareness of the implementation of activities, UKI, and the Itjen in carrying out fraud prevention and detection.*

*The Inspectorate General also actively manages the complaint channel through the whistleblowing application (SIMADU) is the Ministry of Transportation's Whistleblowing System (WBS) application for processing complaints and providing information by whistleblowers in connection with acts that violate laws, regulations/ standards, codes of ethics, policies, and other similar actions in the form of direct threats to the public interest, as well as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).*

*The verification achievement rate for the percentage of follow-up complaints within the Ministry of Transportation was 131.94% or from the target of 87% which had been realized in as many as 100% of complaint reports. There were 148 complaints from the public during 2022, of which most of the complaints had been handled (completed status).*

**Grafik Penanganan Pengaduan Tahun 2022**
*Complaints Handling in 2022*
Total Pengaduan : **148**

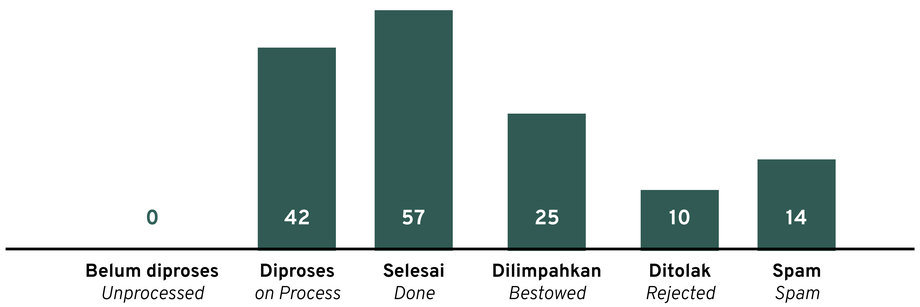

**Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2022**
*Complaints Follow up in 2022*

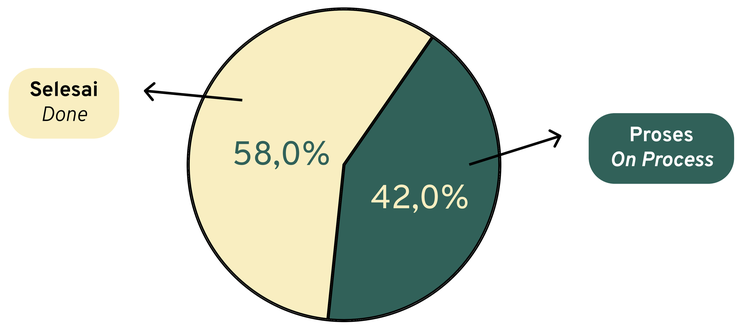


Meskipun bukan barang baru karena SIMADU sudah berjalan empat tahun ini telah melalui beragam dinamika pengelolaan pengaduan yang memerlukan atensi khusus dari jajaran pimpinan. Karena, selain dari pengaduan masyarakat, kegiatan pengawasan Inspektorat Investigasi ini juga dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan, informasi media massa, current issue, dan pelimpahan dari unit lain.

Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal akan dikaji terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan informasi pengaduan agar dapat ditindaklanjuti atau tidak. Demikian juga atas materi temuan dari masing-masing inspektorat yang dilimpahkan kepada Inspektorat Investigasi. Informasi dari pengaduan aplikasi SIMADU maupun dari Inspektorat lain, apabila temuan telah memenuhi unsur minimal akan ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi.

Untuk pengaduan masyarakat, terlebih dahulu dilakukan kajian dan selanjutnya dapat ditentukan apakah informasi dalam pengaduan layak untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi, atau tidak layak untuk ditindaklanjuti. Demikian juga atas materi temuan yang dilimpahkan oleh Inspektorat lain, terlebih dahulu dilakukan kajian dan pemaparan sehingga dapat ditentukan apakah temuan tersebut telah memenuhi unsur minimal untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi.

*Although it is not new because SIMADU has been running for three years, it has gone through various dynamics of complaint management that require special attention from the leadership. Because, apart from public complaints, the Investigation Inspectorate's supervision activities are also carried out based on the direction of the leadership, mass media information, current issues, and a delegation from other units.*

*Complaints submitted by the public to the Inspectorate General will be reviewed first to determine the appropriateness of the complaint information so that it can be followed up or not. The same goes for material findings from each inspectorate which are delegated to the Investigative Inspectorate. Information from SIMADU application complaints and other Inspectorates, if the findings meet the minimum elements, will be followed up with investigative activities.*

*For public complaints, a study is first carried out and then it can be determined whether the information in the complaint is appropriate for follow-up with investigative activities, or not. Likewise, on the material findings delegated by other Inspectorates, a review and presentation are carried out first so that it can be determined whether the findings have met the minimum elements to be followed up with investigative activities.*

**Pengaduan yang Terkumpul dari 2019 - 2022**
*Complaints Based on Submission 2019 - 2022*

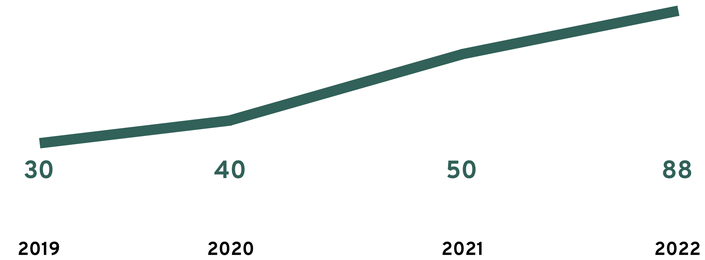


Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta meminimalisir terjadinya perilaku fraud yang dilakukan oleh pegawai Kemenhub, Inspektorat Investigasi bersinergi dengan UKI Eselon I lain dalam penanganan pengaduan masyarakat berbasis web dengan harapan bahwa pegawai juga merasa diawasi oleh masyarakat selaku pengguna layanan.

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Perhubungan telah menerima 148 pengaduan. Tahun ini pun, saluran pengaduan paling banyak berasal dari website yaitu 87 pengaduan atau sebesar 59 persen. Oleh karena itu pemanfaatan saluran pengaduan website akan terus ditingkatkan baik melalui sosialisasi maupun pengembangan fitur pada aplikasi baik dari segi keamanan maupun kemudahan.

*To provide good service to the community, as well as minimize the occurrence of fraudulent behavior perpetrated by employees of the Ministry of Transportation, the Investigation Inspectorate synergizes with other UKI Echelon I in handling web-based public complaints with the hope that employees will also feel that they are being watched by the community as service users.*

*Throughout 2022, the Ministry of Transportation has received 148 complaints. This year too, most of the complaint channels came from the website as many as 87 complaints or as much as 59 percent. Therefore the use of the website complaint channel will continue to be improved both through outreach and by developing features on the application both in terms of security and convenience.*

**Pengaduan yang Diterima dari 2019 - 2022**
*Complaints Received Based on Channel 2019 - 2022*

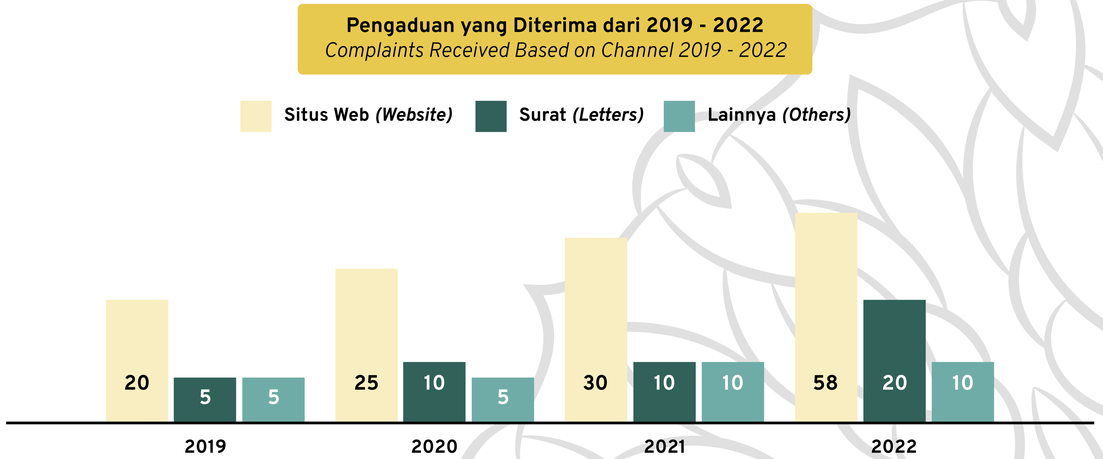

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

# Unit Kerja Kementerian Perhubungan yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM
## *Work Units of the Ministry of Transportation Obtaining the WBK/WBBM Predicate*

Predikat Zona Integrasi (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Inspektorat Jenderal dalam hal ini Inspektorat Investigasi memiliki tanggung jawab untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) agar dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Perhubungan. Tingkat capaian jumlah unit kerja Kementerian Perhubungan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah 3 (tiga) unit kerja dari target 3 (tiga) unit kerja, sehingga pencapaiannya adalah sebesar 100%.

*The Integration Zone (ZI) predicate towards a Corruption-Free Area (WBK) and a Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM) is the initial gate in realizing a clean and serving bureaucracy. The Inspectorate General, in this case, the Investigation Inspectorate, has the responsibility for the development of the Integrity Zone (ZI) to increase public trust in the Ministry of Transportation. The achievement level of the number of work units of the Ministry of Transportation that received the WBK/WBBM title was 3 (three) work units from the target of 3 (three) work units so the achievement was 100%.*

**Predikat Zona Integritas (ZI)**
*Integrity Zone Predicate*

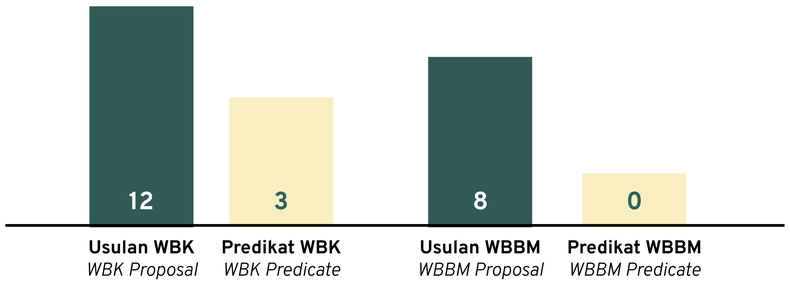

# PERISTIWA PENTING
# *KEY EVENTS*

### Kegiatan Mudik Gratis yang Digelar Kementerian Perhubungan di Terminal Baranangsiang, Bogor

**28 April 2022**

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan melepas kegiatan mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di Terminal Baranangsiang, Bogor. Kegiatan ini untuk memberangkatkan 15 bus pemudik tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebanyak 450 pemudik.

Irjen menyampaikan tujuan diadakannya mudik gratis adalah untuk mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan. Hal ini mengingat setelah dua tahun ada larangan mudik, antusiasme masyarakat untuk mudik sangat tinggi di masa Lebaran tahun ini. Konsep Mudik Gratis yang digunakan adalah sepeda motor pemudik diangkut truk dan orangnya naik bus.

### *Free Homecoming Activities Held by the Ministry of Transportation at the Baranangsiang Terminal, Bogor*

**28 April 2022**

*The Inspector General of the Ministry of Transportation released the free homecoming activity which was held by the Ministry of Transportation at the Baranangsiang Terminal, Bogor. This activity is to dispatch 15 buses for West Java, Central Java and East Java as many as 450 travellers.*

*The Inspector General conveyed that the purpose of holding the free homecoming was to reduce the risk of accidents and traffic jams. This is because after two years there was a ban on going home, and people's enthusiasm for going home was very high during this year's Eid. The concept of Free Mudik is used is that the motorbikes of travellers are transported by trucks and the people get on buses.*

### Pemantauan Arus Mudik Lebaran 1443 H Hari Pertama pada Pelabuhan Semayang Balikpapan

**30 April 2022**

Inspektur Jenderal memantau situasi dan kondisi Pelabuhan Semayang yang sudah terdapat kenaikan penumpang. Terdapat 2 kapal yang beroperasi yaitu KM. Labobar tujuan Surabaya dan KM. Lambelu tujuan Jayapura. Selama pemantauan, Irjen selalu mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan dilakukan pembagian masker sebagai bentuk dukungan kepada penumpang.

### *Monitoring the First Day of Eid 1443 H at Semayang Harbor, Balikpapan*

**30 April 2022**

*The Inspector General monitors the situation and condition of Semayang Port, which has seen an increase in passengers. There are 2 ships operating, namely KM. Labobar to Surabaya and KM. Lambelu to Jayapura. During monitoring, the Inspector General always reminds us to maintain health and implement the applicable health protocols and distribute masks as a form of support to passengers.*

# PERISTIWA PENTING
# *KEY EVENTS*

### Pemantauan Arus Mudik Lebaran 1443H Hari Kedua pada Pelabuhan ASDP Kariangau dan Terminal Tipe A Batu Ampar

**1 Mei 2022**

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan melaksanakan pemantauan arus mudik lebaran 1443H hari kedua pada pelabuhan ASDP Kariangau dan Terminal Tipe A Batu Ampar. Inspektur Jenderal melakukan pengecekan pada pos kesehatan yang menyediakan fasilitas tes tekanan darah hingga fasilitas vaksinasi tahap 1, 2, dan 3 untuk memastikan kesiapan pos tersebut. Pemantauan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pada KM. Laskar Pelangi. Pemantauan yang dilakukan meliputi pengecekan jumlah penumpang, kepatuhan pada prokes, serta kelayakan alat keselamatan yang ada.

### *Monitoring of Eid 1443 H Second Day at ASDP Kariangau Port and Type A Terminal Batu Ampar*

**1 May 2022**

*The Inspector General of the Ministry of Transportation carried out monitoring of the second day of Eid 1443H homecoming flows at ASDP Kariangau port and Type A Terminal Batu Ampar. The Inspector General checks health posts that provide blood pressure test facilities to phase 1, 2 and 3 vaccination facilities to ensure the readiness of the post. Monitoring is then followed by checking the KM. Rainbow Troops. Monitoring carried out includes checking the number of passengers, compliance with the health program, and the feasibility of existing safety equipment.*

### Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Istana Negara yang memiliki tema “Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri”

**14 Juni 2022**

Inspektur Jenderal menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Istana Negara yang memiliki tema “Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri”.

Presiden Joko Widodo pada acara ini menekankan bahwa belanja Pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki 3 (tiga) hal yang penting, yaitu menciptakan nilai tambah pada Negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien dalam belanja. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini agar dapat konsisten dan berkomitmen untuk mengawal dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri. Program Peningkatan Belanja Dalam Negeri ini diharapkan dapat dijalankan dengan penuh kedisiplinan.

Para APIP diharapkan dapat serius dalam mengawal program Belanja Produk Dalam Negeri agar program ini berhasil dan efektif.

### *Opening of the National Coordination Meeting (Rakornas) of Internal Supervision at the State Palace with the theme "Guard Domestic Products for the Independent Nation"*

**14 June 2022**

*The Inspector General attended the Opening of the National Coordination Meeting (Rakornas) of Internal Supervision at the State Palace which had the theme "Guarding Domestic Products for the Independent Nation".*

*President Joko Widodo emphasized at this event that Central and Regional Government spending must have 3 (three) important things, namely creating added value to the State, generating domestic economic growth and efficiency in spending. Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in this case to be consistent and committed to overseeing the fulfilment of targets for spending on domestic products. It is hoped that the Domestic Expenditure Improvement Program will be carried out with full discipline.*

*The APIPs are expected to be serious in overseeing the Domestic Product Expenditure program so that this program is successful and effective.*

# PERISTIWA PENTING
# *KEY EVENTS*

## Kementerian Perhubungan Kembali Meraih Predikat WTP dari BPK RI

**29 Juni 2022**

Sejak tahun 2013, Kemenhub selalu mendapatkan predikat WTP. Dan di tahun 2022 ini, adalah kali kesembilan berturut-turut Kemenhub memperoleh predikat serupa. Hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2021, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. *masukin peran itjen dalam mengawal kemenhub untuk meraih predikat WBK/WBBM

## *Ministry of Transportation Receives WTP Predicate from BPK RI*

**29 June 2022**

*Since 2013, the Ministry of Transportation has always received the WTP title. And in 2022, this is the ninth time in a row that the Ministry of Transportation has received a similar title. The results of the inspection of the Ministry of Transportation's 2021 financial reports, found no significant problems that had an impact on the fairness of the presentation of the financial statements.*

## Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Evaluasi Kinerja Semester I dan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Semester II Tahun 2022

**16 - 17 Juli 2022**

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Evaluasi Kinerja Semester I dan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Semester II Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Aksi Afirmasi Produk Dalam Negeri Atas Penggunaan Belanja di Kementerian Perhubungan”.

Rakornis ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri, serta sebagai salah satu refleksi aksi Inspektorat Jenderal setelah pelaksanaan Rakorwasnas Tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh Pimpinan APIP Pusat dan Daerah di Instansi Pemerintahan.

Dalam arahannya, Irjen berharap agar Program Pengawasan pada Semester II nanti mengambil tematik yang beririsan dengan P3DN dan dapat dilakukan melalui audit, reviu, monitoring atau evaluasi. Diharapkan kegiatan Rakornis ini dijadikan momen yang dapat digunakan sebaik-baiknya dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan tata kelola pengawasan dalam mengawal aksi afirmasi produk dalam negeri atas penggunaan belanja di Kementerian Perhubungan.

## *Technical Coordination Meeting (Rakornis) of Semester I Performance Evaluation and Preparation of the 2022 Semester II Performance Action Plan*

**16 - 17 July 2022**

*The Inspectorate General held a Technical Coordination Meeting (Rakornis) for the Semester I Performance Evaluation and Formulation of the 2022 Semester II Performance Action Plan with the theme "Guarding Action on Affirmation of Domestic Products on Spending Use at the Ministry of Transportation".*

*This coordination meeting is a follow-up to Presidential Instruction Number 2 of 2022 concerning the Acceleration of Increasing Domestic Products, as well as one of the reflections on the Inspectorate General's actions after the implementation of the 2022 National Coordination Meeting which was attended by all Central and Regional APIP Leaders in Government Agencies.*

*In his direction, the Inspector General hopes that the Supervision Program in Semester II will take a theme that intersects with P3DN and can be carried out through audits, reviews, monitoring or evaluation. It is hoped that this Rakornis activity will be used as a moment that can be used as well as possible in coordinating and synergizing supervisory governance in overseeing the affirmation of domestic products for the use of spending at the Ministry of Transportation.*

# PERISTIWA PENTING
# *KEY EVENTS*

## Penandatanganan Nota Kesepahaman BPKP dengan Kementerian Perhubungan

**24 Agustus 2022**

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dengan BPKP tentang Kerja Sama Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Aula Ghandi Kantor Pusat BPKP. MoU ini diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dan kolaborasi di bidang pengawasan, khususnya terkait dengan Pengelolaan dan Akuntabiltas Keuangan Negara serta Pengendalian Internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan ini Menhub mengapresiasi kepada BPKP yang selama ini telah banyak membantu Kemenhub dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pembangunan serta memberikan pesan agar Inspektorat Jenderal Kemenhub dapat bekerjasama dengan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan terutama terkait pekerjaan yang masuk dalam Program Strategis Nasional, diharapkan fungsi pengawasan di Kemenhub semakin efektif dan menghasilkan manfaat yang baik serta memberikan nilai tambah terhadap pembangunan nasional di sektor transportasi.

## *BPKP Signing of Memorandum of Understanding with the Ministry of Transportation*

**24 August 2022**

*Signing of a Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation and BPKP on Cooperation to Strengthen Financial Accountability and Development within the Ministry of Transportation in Ghandi Hall, BPKP Head Office. It is hoped that this MoU will create synergy and collaboration in the field of supervision, particularly in relation to Management and Accountability of State Finances and Internal Control within the Ministry of Transportation, which can be carried out properly.*

*On this occasion the Minister of Transportation appreciated the BPKP which has so far assisted the Ministry of Transportation in implementing budget management and development and gave a message so that the Inspectorate General of the Ministry of Transportation can cooperate with BPKP in carrying out supervision, especially related to work that is included in the National Strategic Program, it is hoped that the supervisory function at the Ministry of Transportation will increase effective and generate good benefits as well as provide added value to national development in the transportation sector.*

## Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan

**1 September 2022**

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Itjen telah melakukan terobosan melalui terbentuknya Komite Audit Kementerian Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.111 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.191 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan. *Institute of Internal Auditors* (IIA) mengatakan bahwa komite audit merupakan kunci utama pembangunan *governance*. Tentu saja besar harapan kita bahwa tata kelola Kemenhub akan meningkat seiring terbentuknya komite audit ini.

## Establishment of the Ministry of Transportation Audit Committee

**1 September 2022**

*The Inspectorate General has made a breakthrough by establishing the first audit committee in the government sector, following the issuance of Minister of Transportation Decree No. KM.111 of 2022 and issuance of Minister of Transportation Decree No. KM.191 of 2022 concerning Establishment of the Audit Committee of the Ministry of Transportation. The Institute of Internal Auditors (IIA) has stated that the audit committee is the main key to the development of governance. The hope is of course that governance within the Ministry of Transportation will improve following the founding of the audit committee.*

# PERISTIWA PENTING
# *KEY EVENTS*

Tujuan utama komite audit adalah membantu tugas Menteri Perhubungan atas pelaksanaan tusi pengawasan internal oleh Itjen dan memberikan saran serta masukan kepada Menteri Perhubungan dan/atau Irjen dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan intern oleh Itjen. Komite audit menilai dan memastikan bahwa itjen sudah memperhatikan kebutuhan Kemenhub khususnya *stakeholder* utama yaitu Menteri Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar Itjen dapat lebih menunjukkan performanya. Dengan demikian tusi komite audit tidak akan *overlapping* dengan Itjen. Secara umum, komite audit membantu mencegah kelalaian atas seluruh pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama bagi komite audit dalam melaksanakan tugasnya sebagai *strategic partner* Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Komite audit telah mengimplementasikan program kerja melalui koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam membahas isu-isu strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selama tahun 2022 Komite audit memberikan rekomendasi atas program kerja Itjen salah satunya berupa evaluasi penerapan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

*The main objective of the audit committee is to assist the Minister of Transportation in relation to the task of internal supervision performed by the Inspectorate General. as well as input to the Minister of Transportation and/or Inspector General to improve the quality of internal supervision by the Itjen. The audit committee assesses and ensures that the IG has considered the needs of the Ministry of Transportation, especially that of the main stakeholder, i.e. the Minister of Transportation. This also has the objective of the IG to better demonstrate its performance. As the result, the duties of the audit committee do not overlap with that of the IG. In general, the audit committee assists in preventing negligence with respect to oversight beginning from planning, implementation, reporting, to follow-up.*

*2022 was the first year for the audit committee to perform its duties as a strategic partner of the Inspectorate General. The Audit Committee has implemented a work program in coordination with the Inspectorate General and other echelon I units to discuss strategic issues within the Ministry of Transportation. During 2022 the audit Committee provided recommendations on the work program of the Inspectorate General, one of which was an evaluation of the implementation of the Indonesian Government's Internal Audit Standards.*

## Serah Terima Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

**20 September 2022**

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin Serah Terima Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dari Gede Pasek Suardika kepada M. Pramintohadi Sukarno. Dengan serah terima jabatan tersebut, M. Pramintohadi Sukarno yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan selanjutnya Gede Pasek Suardika menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan.

## *Handover of the Position of Inspector General of the Ministry of Transportation*

**20 September 2022**

*Minister of Transportation Budi Karya Sumadi led the Handover of the Position of Inspector General of the Ministry of Transportation from Gede Pasek Suardika to M. Pramintohadi Sukarno. With the handover of this position, M. Pramintohadi Sukarno, who previously served as Expert Staff to the Minister for Technology, Environment and Energy for Transportation, became the Inspector General of the Ministry of Transportation and subsequently Gede Pasek Suardika served as Head of the Transportation Policy Agency (Baketrans) of the Ministry of Transportation.*

# PERISTIWA PENTING
# *KEY EVENTS*

## Pembukaan *Flagoff Touring* Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai

**7 November 2022**

Dalam rangka mendukung kegiatan KTT G20 dan memberikan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang kendaraan ramah lingkungan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi oleh Inspektur Jenderal M Pramintohadi Sukarno mengahadiri pembukaan Flagoff Touring Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 15 Kendaraan Listrik dan 5 Kendaraan Konvensional (Pendamping / Logistic). Sustainable Energy Transation atau Transisisi Energi Berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas dari KTT G20. Indonesia sebagai presidensi KTT G20 mendukung penuh transisi energi global dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

## *Opening of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Touring Flagoff*

**7 November 2022**

*In order to support the activities of the G20 Summit and provide education and outreach to the public about environmentally friendly vehicles, the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi accompanied by Inspector General M Pramintohadi Sukarno attended the opening of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Flagoff Touring.*

*This activity was attended by 15 Electric Vehicles and 5 Conventional Vehicles (Companion / Logistics). Sustainable Energy Transition or Sustainable Energy Transition is one of the priority issues of the G20 Summit. Indonesia as the presidency of the G20 Summit fully supports the global energy transition by issuing Presidential Regulation Number 55 of 2019 concerning the Acceleration of the Battery-Based Electric Motorized Vehicle Program for Road Transportation.*

## Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 Kementerian Perhubungan

**8 Desember 2022**

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 Kementerian Perhubungan dilaksanakan dengan Pemberian Penghargaan Ketaatan dan kepatuhan pelaporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kategori Unit Pengendalian Gratifikasi, Unit Kepatuhan Internal, dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit.

Pemberian Penghargaan juga diberikan kepada 3 UPT yang meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, dan dilanjutkan dengan rangkaian penandatanganan Komitmen Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya. Dalam sambutannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pentingnya menerapkan 4 No's oleh seluruh insan Perhubungan. Menhub juga mengingatkan agar peringatan Hakordia sebagai upaya meningkatkan integritas seluruh pegawai.

## *Commemoration of World Anti-Corruption Day 2022 Ministry of Transportation*

**8 December 2022**

*The 2022 World Anti-Corruption Day (Hakordia) commemoration of the Ministry of Transportation was carried out with the Awarding of Obedience and Compliance Reporting of the Technical Implementation Unit (UPT) for the Category of Gratification Control Unit, Internal Compliance Unit, and Follow-up on Audit Result Reports.*

*Awards were also given to 3 UPTs that won the Corruption-Free Area Predicate and continued with a series of signings of the Commitment for Corruption-Free Areas and Clean Serving Bureaucratic Areas by all Middle High Officials. In his remarks, the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi said the importance of implementing the 4 No's by all Transportation personnel. The Minister of Transportation also reminded me that the Hakordia warning was an effort to improve the integrity of all employees.*

# 03 SUMBER DAYA MANUSIA ITJEN

## *Human Resources Management of ITJEN*

# PROFIL DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
# *HUMAN RESOURCES PROFILE AND MANAGEMENT*

## Penambahan Sumber Daya Itjen 2019 - 2022
*Inspectorate General Resources 2019 - 2022*

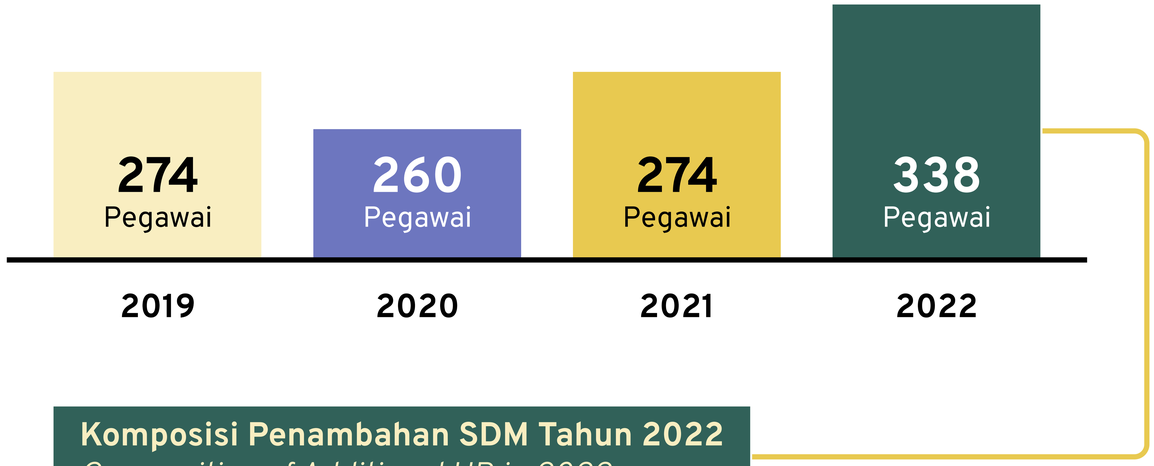


## Komposisi Penambahan SDM Tahun 2022
*Composition of Additional HR in 2022*

**SDM Tahun 2022**
**264** Pegawai

+

**CPNS**
**74** Pegawai

## SDM Pendukung
*Additional HR*

**PPNPN**
**28** Pegawai

## Profil Jabatan Fungsional Tertentu
*Specific Functional Profile Positions*

| | |
|---|---|
| **Analis Hukum Ahli Muda**<br>*Young Expert Legal Analyst* | 1 |
| **Analis Kepegawaian Ahli Muda**<br>*Young Expert Staffing Analyst* | 1 |
| **Analis Kepegawaian Mahir**<br>*Advanced Personnel Analyst* | 1 |
| **Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda**<br>*Financial Management Analyst APBN Young Experts* | 1 |
| **Analis SDM Aparatur Ahli Pertama**<br>*Apparatus HR Analyst First Expert* | 2 |
| **Arsiparis Ahli Muda**<br>*Young Expert Archivist* | 2 |
| **Arsiparis Ahli Pertama**<br>*First Expert Archivist* | 6 |
| **Arsiparis Penyelia**<br>*Supervising Archivist* | 1 |
| **Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Ahli Muda**<br>*Young Expert PBJ Manager* | 1 |
| **Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama**<br>*Regulation Planner First Legislation* | 2 |
| **Perencana Ahli Pertama**<br>*First Expert Planner* | 2 |
| **Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda**<br>*Public Relations Young Expert* | 1 |
| **Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama**<br>*Public Relations First Expert* | 2 |
| **Pranata Komputer Pertama**<br>*Computer System First Expert* | 2 |

# PROFIL DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
# *HUMAN RESOURCES PROFILE AND MANAGEMENT*

## Profil Jabatan Fungsional Auditor
*Auditor Positions Profile*

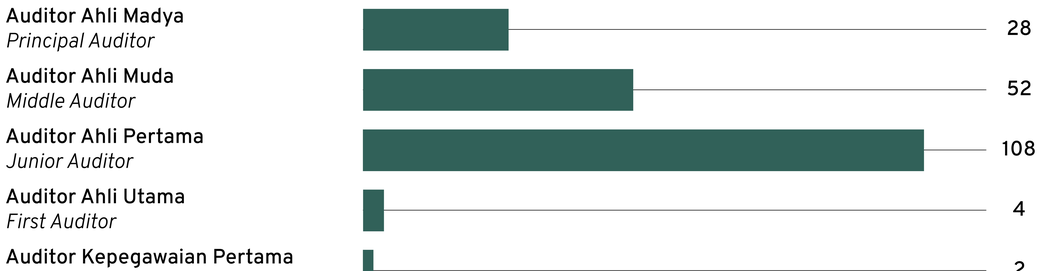


## Profil Jabatan Fungsional Umum
*General Positions Profile*

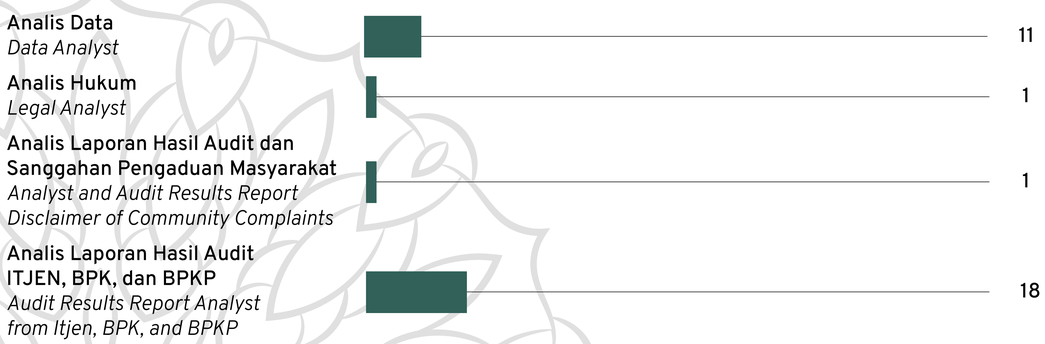


## Profil Jabatan Fungsional Umum
*General Positions Profile*

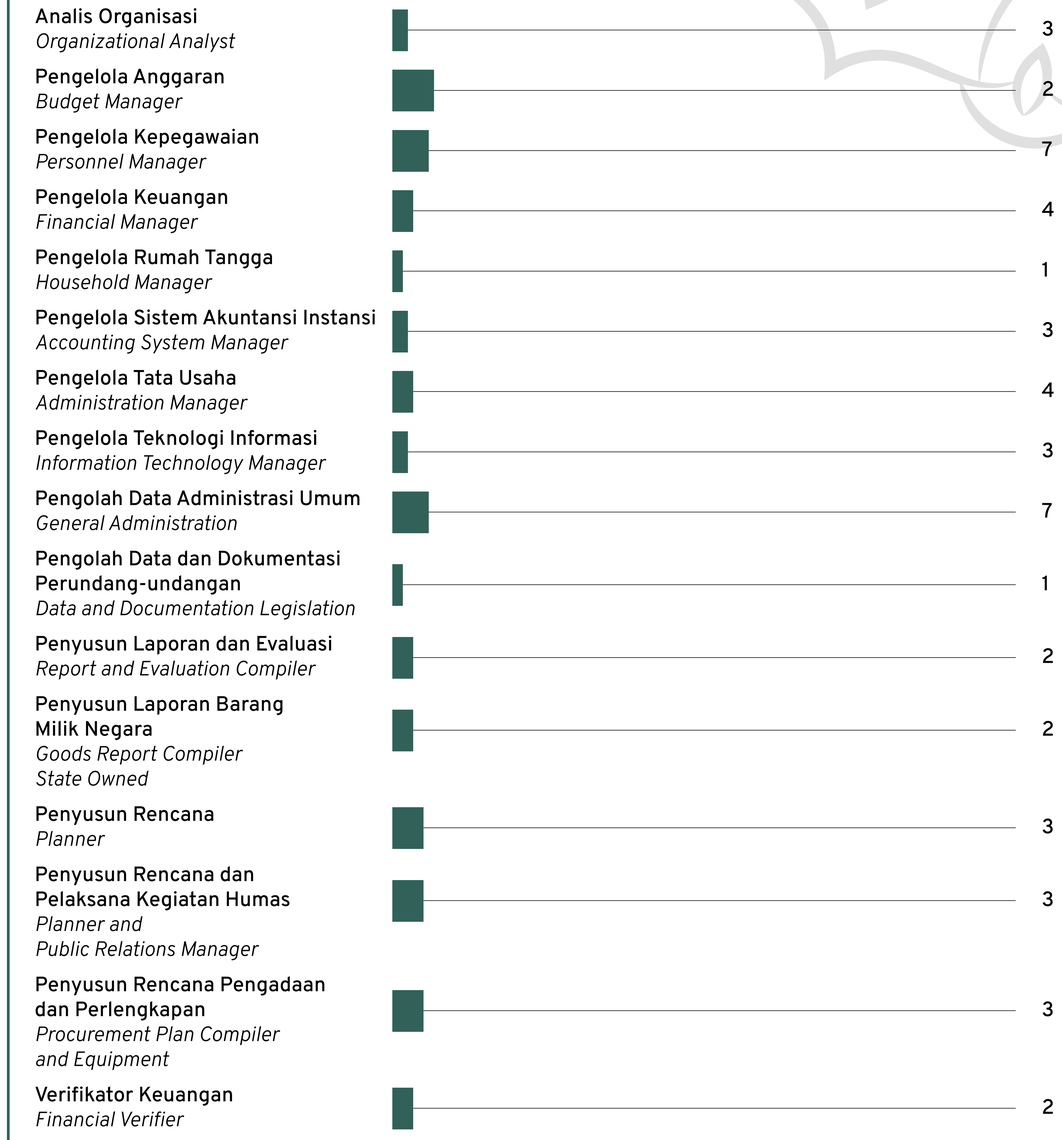

# PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
# *HUMAN RESOURCES COMPETENCE ENHANCEMENT*

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum terkhususnya untuk Itjen dalam melakukan kegiatan pengawasan sektor transportasi. Oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang baik dalam organisasi tersebut. Melalui Unit Kerja Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata laksana, Itjen selalu berusaha sebaik mungkin untuk selesai meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya.

Selama Tahun 2022, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan oleh Itjen secara kontinu yang berfokus kepada kemampuan pengawasan sektor transportasi. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Substantif untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Sehingga, seluruh pegawai memiliki kompetensi yang sama untuk setiap jabatan dalam melakukan pengawasan intern. Itjen juga melakukan program pengembangan profesionalisme SDM di bidang pengelolaan risiko termasuk risiko fraud yang secara langsung mendukung kegiatan pengawasan intern. Melakukan evaluasi berkala juga tak lupa Itjen laksanakan terkait kebijakan SDM agar dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan organisasi.

*Management of human resources is a very important aspect in the education process in general, especially for the Inspectorate General in carrying out supervisory activities in the transportation sector. Therefore the functions in human resource management must be carried out optimally so that the needs related to individual, corporate, organizational or institutional goals can be achieved. This will not go well if there is no good human resource management in the organization. Through the Work Unit of Human Resources, Organization and Management, the Inspectorate General always tries its best to finish improving the competence of its human resources.*

*During 2022, human resource management activities will be carried out by the Inspectorate General continuously focusing on the supervisory capabilities of the transportation sector. Increasing HR competence through Substantive Training to improve the quality of supervision results for all employees in carrying out supervisory activities. Thus, all employees have the same competence for each position in carrying out internal control. The Inspectorate General also conducts HR professionalism development programs in the field of risk management including fraud risk which directly supports internal control activities. Do not forget to carry out periodic evaluations by the Inspectorate General regarding HR policies so that they can find out the improvements needed by the organization.*

**Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM 2022**
*HR Competency Development 2022*

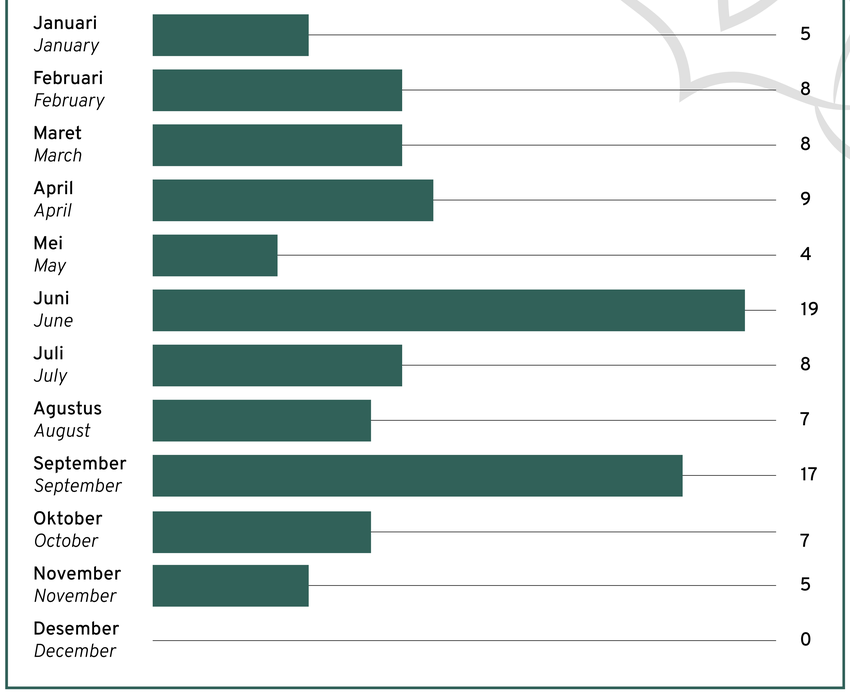


**Sertifikasi Profesi Auditor ITJEN**
*ITJEN Professional Certifications Detail*

- **Qualified Internal Auditor (QIA)** = 25
- **Certified Risk Management Officer (CRMO)** = 31
- **Certified Risk Management Professional (CRMP)** = 2
- **Certified Risk Governance Professional (CRGP)** = 1
- **Certified Forensic Auditor (CFrA)** = 21
- **Qualified Chief Risk Officer (QCRO)** = 1
- **Certified Securities Analyst (CSA)** = 1
- **Certified Government Accounting Associate (CGCAA)** = 3
- **Certified Chartered Accountant (CA)** = 3

# PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
## *HUMAN RESOURCES COMPETENCE ENHANCEMENT*

### Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
*Risk Based Supervision Planning Training*

### Workshop Penerapan Manajemen Risiko
*Risk Management Implementation Workshop*

### Pelatihan Manajemen Risiko
*Risk Management Training*

### Bimbingan Teknis Implementasi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko
*Integrated SPIP Implementation and Risk Management Technical Guidance*

# PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
# *HUMAN RESOURCES COMPETENCE ENHANCEMENT*

## Bimbingan Teknis Fotografi, Videografi dan Jurnalistik
*Technical Guidance on Photography, Videography and Journalism*

## Bimbingan Teknis Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021
*Technical Guidance Evaluation on the Implementation of SAKIP in 2021*

## Pelatihan System Dinamics Modelling
*System Dynamics Modeling Training*

## Bimbingan Teknis Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dan Pembahasan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
*APIP Capability Improvement Task Force Technical Guidance and Discussion of APIP Capability Self-Assessment Working Paper*

# 04

# KEGIATAN STRATEGIS

## *STRATEGIC EVENT*

## Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK)
*National Strategy for Prevention of Corruption*

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut STRANAS-PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Pemerintah aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Againts Corruption*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dalam pelaksanaan STRANAS-PK, Itjen berperan sebagai Focal Point yang mengawal sekaligus menjadi penghubung antara KPK dengan Unit Kerja yang dinilai. Penilaian di Kementerian Perhubungan dilaksanakan pada sektor berikut; Matriks *Logframe* PNBP pada Biro Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro LPPBMN, Akreditasi Unit Pelaksana-Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UP-UBKB) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Aksi Pembenahan Tata Kelola pada 14 Pelabuhan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

*The National Strategy for Prevention of Corruption, hereinafter referred to as STRANAS-PK, is a national policy direction that contains the focus and targets for preventing corruption which is used as a reference for ministries, agencies, local governments and other stakeholders in carrying out actions to prevent corruption in Indonesia. The government is actively involved in various global initiatives to fight corruption. One way is through the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (United Nations Convention Against Corruption) through Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003).*

*In implementing the STRANAS-PK, the Inspector General acts as a Focal Point who oversees and acts as a liaison between the KPK and the Work Unit being assessed. Assessment at the Ministry of Transportation is carried out in the following sectors; PNBP Logframe Matrix at the Finance Bureau, Procurement of Goods and Services at the LPPBMN Bureau, Accreditation of Motor Vehicle Periodic Test Executor Unit (UP-UBKB) at the Directorate General of Land Transportation, and Governance Improvement Actions at 14 Ports at the Directorate General of Sea Transportation.*

### STRANAS-PK di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara
*STRANAS-PK at Belawan Port, North Sumatra*

### STRANAS-PK di Pelabuhan Utama Makassar Sulawesi Selatan
*STRANAS-PK at Makassar Main Port, South Sulawesi*

# Pengawasan Pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare
## *Supervision of Makassar-Parepare Railway Development*

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden serta atensi dari Menteri Perhubungan, Itjen bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pembangunan Kereta Makassar – Parepare. Hal ini tidak lepas dari peran dan fungsi Itjen sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor*, sehingga Itjen dapat menjadi katalisator bagi Kementerian Perhubungan. Itjen memberikan arahan kepada pihak-pihak terkait agar segera mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga bersama Itjen dapat mencari solusi-solusi atas hambatan yang ada pada pembangunan Kereta Makassar – Parepare.

Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan Kereta Makassar-Parepare agar target beroperasi Kereta Api Makassar – Parepare dapat tercapai. Itjen juga berharap dengan adanya pertemuan ini maka pihak-pihak terkait dapat membuat timeline yang terarah dan dari Inspektorat Jenderal dapat secara periodik melakukan pengawasan pembangunan serta senantiasa selalu siap memberikan pendampingan dan konsultasi.

*To follow up on the President's direction and attention from the Minister of Transportation, the Inspectorate General is in charge of monitoring and evaluating the construction of the Makassar - Parepare Train. This cannot be separated from the role and function of the IG as a strategic partner and trusted advisor so that the IG can become a catalyst for the Ministry of Transportation. The Inspectorate General gives directions to related parties to immediately evaluate the problems encountered so that together with the Inspectorate General they can find solutions to the obstacles that exist in the construction of the Makassar - Parepare Train.*

*This was done as an effort to accelerate the development of the Makassar-Parepare Railway so that the target of operating the Makassar-Parepare Railway can be achieved. The Inspectorate General also hopes that with this meeting, related parties can make a directed timeline and the Inspectorate General can periodically carry out development supervision and always be ready to provide assistance and consultation.*

### Pemantauan Progres Pembangunan Kereta Api Makassar-Parepare
*Monitoring the Progress of the Makassar-Parepare Railway Development*

# Pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN)
## *Supervision of National Strategic Projects*

Proyek Strategis Nasional atau PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan peran Itjen sebagai penjamin terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan tentang tata kelola keuangan negara, tugas pokok dan fungsi organisasi unit kerja serta pemberian pendapat terhadap program khususnya program Proyek Strategis Nasional, maka Itjen melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PSN.

Tujuan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini yaitu untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan serta untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya.

*The National Strategic Project or PSN is a project implemented by the Government, in this case, the Ministry of Transportation, which has a strategic nature for increasing growth and equitable development to improve community welfare and regional development. To realize the role of the Inspectorate General as guarantor for the implementation of activities under laws and regulations concerning state financial management, main tasks and organizational functions of work units and providing opinions on programs, especially the National Strategic Projects program, the Inspectorate General carries out monitoring and evaluation of the implementation of PSN activities.*

*The purpose of this monitoring and evaluation activity is to ensure that a program or activity is carried out according to the plan set and to see the level of success in managing the activity, through a study of the output of its implementation and the problems encountered, to further serve as material for evaluating the performance of subsequent programs and activities.*

### Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Operasional Pelabuhan Patimban
*Monitoring and Evaluation of the Implementation of the Construction of Patimban Port Operational Support Facilities*

## Pemantauan Pekerjaan Proyek Strategis Nasional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

*Monitoring of National Strategic Project Work in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara*

## Revitalisasi Terminal Bus Tipe A di Jawa Timur

*Revitalization of Type A Bus Terminal in East Java*

# Pengawasan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)
## *(Supervision of the Construction Jakarta Bandung Fast Train)*

Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah pembangunan infrastruktur skala besar. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan infrastruktur skala besar yang dimaksud dalam hal ini adalah Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan ikon sekaligus momentum Indonesia melakukan modernisasi transportasi massal di era kemajuan yang sedang berlangsung terus menerus. Kereta Cepat Jakarta Bandung akan melintasi beberapa stasiun, mulai dari Stasiun Halim - Stasiun Karawang - Stasiun Padalarang yang akan ditempuh kurang lebih 36-45 menit, selanjutnya dari stasiun Padalarang akan menjadi stasiun perjumpaan antara kereta cepat dengan kereta *feeder* Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akan menuju Stasiun Bandung ( menggunakan kereta *feeder*) dengan waktu tempuh kurang lebih 22 menit. Kecepatan Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa diatur antara 250-350 kilometer per jam, dengan 2 kali pemberhentian yaitu di Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang.

Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Itjen untuk memberikan assurance dan consulting bagi Kementerian Perhubungan, Itjen selalu melakukan pengawalan dan pengawasan KCJB terkait posisi kemajuan pembangunan infrastruktur, perencanaan, dan kesiapan pengoperasian kereta cepat meliputi sarana, SOP, integrasi antar moda dan aksesibilitas ke dan dari stasiun. Itjen memastikan Semua prosedur harus dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku, agar tidak terjadi masalah di lapangan. Itjen selalu mengingatkan kepada pihak terkait agar segera memetakan masalah-masalah yang bersifat critical untuk disampaikan kepada pimpinan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang ada segera diberikan solusi dan tidak mengendap yang kemungkinan menjadi masalah yang lebih besar lagi pada akhirnya.

*West Java Province is a large-scale infrastructure development area. This can be seen from the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and Presidential Regulation Number 3 of 2015 concerning National Strategic Projects which was strengthened by Presidential Instruction Number 1 of 2016 concerning the Acceleration of National Strategic Projects. The large-scale infrastructure development referred to in this case is the Jakarta Bandung Fast Train (KCJB).*

*The construction of the Jakarta-Bandung Fast Train is an icon as well as a momentum for Indonesia to modernize mass transportation in an era of ongoing progress. The Jakarta Bandung Fast Train will cross several stations, starting from Halim Station - Karawang Station - Padalarang Station which will take approximately 36-45 minutes, then from Padalarang station it will be a meeting point between the fast train and the feeder train Jakarta Bandung Fast Train which will go to Bandung Station (using the feeder train) takes approximately 22 minutes. The speed of the Jakarta Bandung Fast Train can be adjusted between 250-350 kilometres per hour, with 2 stops, namely at Karawang Station and Padalarang Station.*

*In the context of carrying out the role and function of the Inspectorate General to provide assurance and consulting for the Ministry of Transportation, the Inspectorate General always supervises and supervises KCJB regarding the position of infrastructure development progress, planning and readiness for fast train operations including facilities, SOP, intermodal integration and accessibility to and from the station. The Inspectorate General ensures that all procedures must be carried out by the applicable NSPK so that problems do not occur in the field. The Inspectorate General always reminds related parties to immediately map critical issues to be submitted to the leadership. This is intended so that any existing problems are immediately given a solution and do not precipitate which is likely to become an even bigger problem in the end.*

### Pemantauan Progress Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar Bandung

Inspektur Jenderal Kemenhub didampingi oleh tim melaksanakan Pemantauan Progres Pembangunan KCJB di Stasiun Tegalluar Bandung. Tegalluar sendiri menjadi salah satu stasiun pemberhentian KCJB. Namun, wilayah Tegalluar ini merupakan kawasan di luar kota Bandung. Tegalluar termasuk Kabupaten Bandung atau daerah penyangga Ibu Kota Jawa Barat saat ini yakni Bandung. Proyek KCJB dapat menumbuhkan ekonomi baru dan berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan. Penambahan Infrastruktur yang berkaitan dengan memperlancar mobilitas arus manusia, maupun barang di wilayah-wilayah tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru.

### *Monitoring the Progress of the Jakarta Bandung Fast Train Development at Tegalluar Bandung Station*

*The Inspector General of the Ministry of Transportation was accompanied by a team carrying out Monitoring of the Progress of KCJB Development at Tegalluar Bandung Station. Tegalluar itself is one of the KCJB stop stations. However, the Tegalluar area is an area outside the city of Bandung. Tegalluar is included in Bandung Regency or the buffer zone for the current capital city of West Java, namely Bandung. The KCJB project can grow a new economy and has the potential to open up many jobs. the addition of infrastructure related to facilitating the movement of people and goods in these areas has the potential to increase new economic growth.*

### Pemantauan Progress Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Padalarang Bandung

Inspektur Jenderal Kemenhub didampingi oleh tim melaksanakan Pemantauan Progres Pembangunan KCJB di Stasiun Padalarang Bandung, dilanjutkan monitoring ke Jpl 150-a Jalan Bapa ampi Kel. Baros dan daerah se-kota Cimindi yang rencananya akan dibuatkan *flyover* di daerah tersebut. Pembangunan KCJB merupakan *icon* serta momentum untuk melakukan modernisasi transportasi massal yang sudah ada, saat ini progres KCJB mengalami kemajuan yang sangat berarti.

### *Monitoring the Progress of the Jakarta Bandung Fast Train Development at Padalarang Bandung Station*

*The Inspector General of the Ministry of Transportation accompanied by a team carried out Monitoring the Progress of the KCJB Development at Bandung's Padalarang Station, followed by monitoring to Jpl 150-a Jalan Bapa ampi Kel. Baros and the area around Cimindi, which is planned to be made a flyover in the area. The development of KCJB is an icon as well as a momentum to carry out the modernization of existing mass transportation, currently the progress of KCJB is experiencing very significant progress.*

05

# PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

## *FACILITIES AND INFRASTRUCTURE*

# DUKUNGAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
# *SUPERVISION INFORMATION SYSTEM SUPPORT*

### Sistem Informasi Pengawasan Eksternal (SIMPEL)
***External Control Information System***

Menjadi wadah bagi Inspektorat Jenderal untuk melaporkan, mengarsipkan, serta menganalisis rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh pihak eksternal dalam hal pengawasan.

*Become a system for the Inspectorate General to report, archive, and analyze recommendations given by external parties in terms of supervision.*

### Sistem Informasi Audit (SIAU)
***Audit Information System***

Mendigitalisasi proses audit yang dimulai sejak perencanaan, pengusulan (SiAU modul keuangan), pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern termasuk Aplikasi Kendali Mutu Audit.

*Digitizing the audit process starting from planning, proposing (SiAU financial module), implementing, reporting to monitoring the follow-up of recommendations on internal control results including the Audit Quality Control Application.*

### Website Itjen
***Itjen Website***

Merupakan portal bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui secara terbuka apa saja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan beserta hasil dari kegiatan-kegiatan pengawasan.

*Is a portal for Indonesian people to openly find out what the Inspectorate General of the Ministry of Transportation does and the results of monitoring activities.*

### Sistem Informasi Prestasi dan Cela (SISILA)
***Achievement and Discourtesy Information System***

Memberikan informasi rekam jejak pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan berupa prestasi maupun perilaku tercela.

*Provide information on the track record of employees within the Ministry of Transportation in the form of achievements and disgraceful behavior.*

### Sistem Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU)
***Whistleblowing System***

Aplikasi whistleblowing system (WBS) atau penanganan pengaduan.

*Whistleblowing system (WBS) application or complaint handling.*

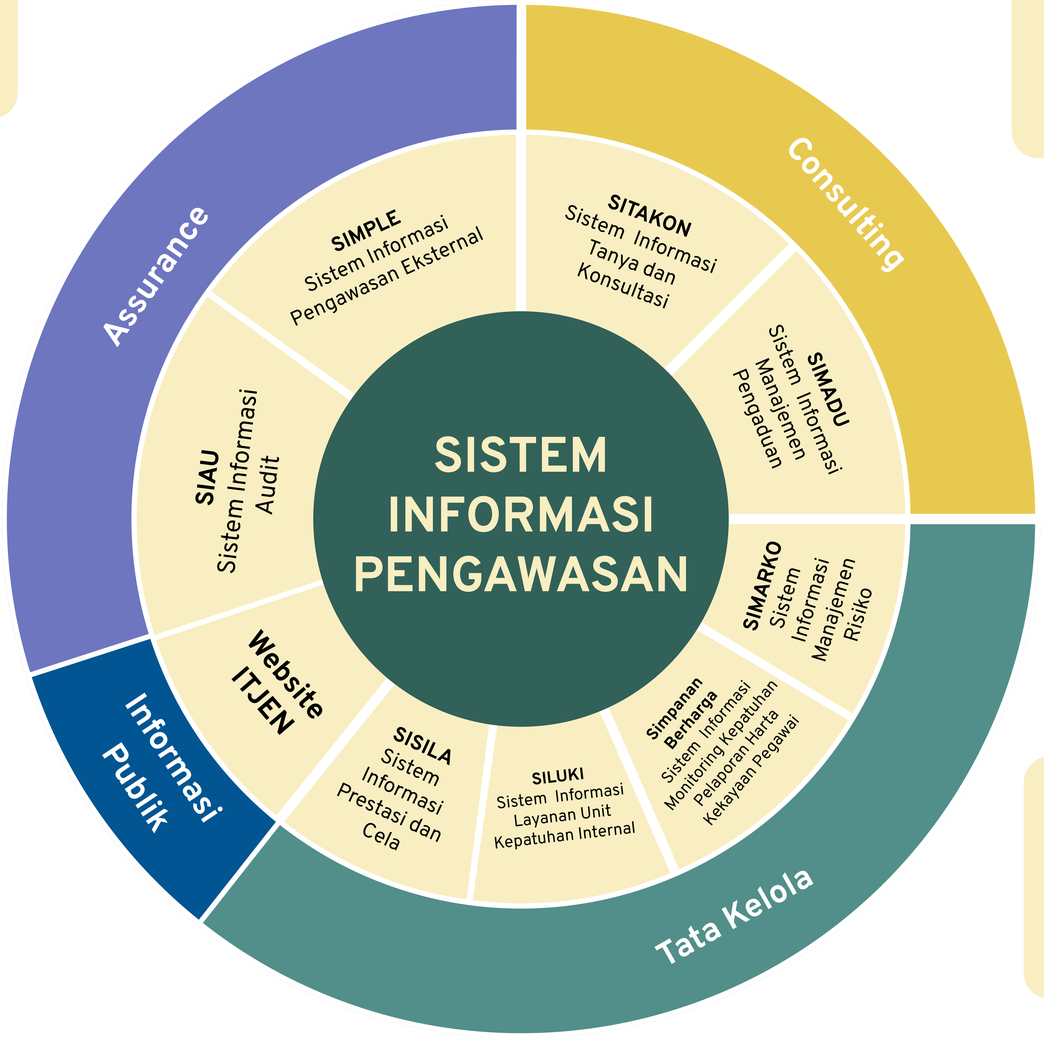


### Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON)
***Query and Consultation Information System***

Sebagai media atau wadah tanya dan konsultasi bagi Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan audit dan permasalahan yang dihadapi dan saat ini sudah tersedia dalam platform android.

*As a media or forum for questions and consultations for Work Units or Technical Implementation Units (UPT) to convey matters related to audits and problems encountered and are currently available on the Android platform.*

### Sistem Informasi Monitoring Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai (Simpanan Berharga)
***Compliance Monitoring Information System for Reporting Employee Assets***

Menyediakan instrumen *monitoring* kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan yang komprehensif meliputi LHKPN dan LHKASN seluruh pegawai Kementerian Perhubungan.

*Provide monitoring instruments for compliance with submission of comprehensive wealth reports covering LHKPN and LHKASN for all employees of the Ministry of Transportation.*

### Sistem Informasi Layanan Unit Kepatuhan Internal (SILUKI)
***Internal Compliance Unit Service Information System***

Aplikasi yang menyediakan instrumen monitoring kepatuhan penyampaian laporan Unit Kepatuhan Internal Kementerian Perhubungan.

*Application that provides compliance monitoring instruments for submitting reports to the Ministry of Transportation's Internal Compliance Unit.*

### Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO)
***Risk Management Information System***

Aplikasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat rencana tindak pengendalian risiko-risiko yang ada di Kementerian Perhubungan khususnya untuk penyusunan Rencana Program Pengawasan Tahunan (PKPT).

*Application to identify, analyze, and create an action plan for controlling risks in the Ministry of Transportation, especially for the preparation of the Annual Monitoring Program Plan.*

# DUKUNGAN ALAT BANTU SARANA AUDIT
# *AUDIT FACILITY SUPPORT TOOLS*

| No. | Nama Barang *(Name of Stuffs)* | | | Jumlah *(Quantity)* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alat Uji Non Destruktif Mengukur Kedalaman Retak Pada Beton *(Crack Depth Gauge)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | Beijing Time High Technology Ltd | |
| | Tipe *(Type)* | : | TC200 | |
| 2. | Alat Uji Non Destruktif Mengukur Lebar Retak Pada Beton *(Crack Width Gauge)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | Beijing Time High Technology Ltd | |
| | Tipe *(Type)* | : | TC410 | |
| 3. | Alat Uji Non Destruktif Mengukur Mengetahui Letak, Diameter Tulangan, dan Selimut Beton *(Rebar Locator)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | Beijing Time High Technology Ltd | |
| | Tipe *(Type)* | : | TC110 | |
| 4. | *Thermocouple Data Logger Complete with Software and Thermocouple Type K* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | Onset-HOBO | |
| | Tipe *(Type)* | : | UX100-014M+BHW-PRO-CD+TCP6-K12 | |

| No. | Nama Barang *(Name of Stuffs)* | | | Jumlah *(Quantity)* |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Alat Mengukur Panjang Lebar, Sudut Kemiringan, dan Menghitung Luas *(Distometer)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | LEICA | |
| | Tipe *(Type)* | : | Leica Disto D810 Touch | |
| 6. | Alat Uji Non Destruktif Mengukur Kekerasan Pada Beton *(Digital Concrete Test Hummer)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | Beijing Time High Technology Ltd | |
| | Tipe *(Type)* | : | HT225-V | |
| 7. | Jangka Sorong Digital *(Metric Digital Caliper)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | INSIZE | |
| | Tipe *(Type)* | : | 1109-300W Without Thumb Roler | |
| 8. | TV LCD *(LCD TV)* | | | 5 Unit *(5 Units)* |
| | Merek *(Brand)* | : | SAMSUNG | |
| | Tipe *(Type)* | : | UA32FH4003 | |

# 06

# KETERLIBATAN *STAKEHOLDER*

## *STAKEHOLDER INVOLVEMENT*

## Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses MP. IV TS. 2021 – 2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan

*Commission V DPR RI Working Visit During MP Recess. IV TS. 2021 – 2022 to South Kalimantan Province*

Itjen melaksanakan Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses MP. IV TS. 2021 – 2022 ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Tim Komisi V DPR RI dan 12 Anggota Komisi V DPR RI serta Mitra Kerja yang dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian PDTT, Basarnas, BMKG dan Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan selatan.

Kegiatan diawali dengan peninjauan progress pekerjaan jalan Matraman Kabupaten Banjar, peninjauan pembangunan jalan dan jembatan Kembar Kabupaten Balangan (Kementerian PUPR), Peninjauan Bandara Warokin, peninjauan lokasi rencana Bandara Internasional Kabupaten Tabalong dan Rapat Bersama Mitra Kerja serta Peninjauan Pelabuhan Laut Trisakti Banjarmasin.

*The Inspectorate General carries out Assistance for Commission V Work Visits of the DPR RI during the MP Recess. IV TS. 2021 – 2022 to South Kalimantan Province. The activity was attended by the Chairperson of the DPR RI Commission V Team and 12 Members of Commission V DPR RI and Partners who were attended by the Ministry of Transportation, Ministry of PUPR, Ministry of PDTT, Basarnas, BMKG and Regional Governments in the South Kalimantan Region.*

*The activity began with a review of the progress of the Matraman road work in Banjar Regency, a review of the construction of twin roads and bridges in Balangan Regency (Ministry of Public Works and Public Housing), an inspection of Warokin Airport, an inspection of the planned location of the Tabalong Regency International Airport and a Joint Meeting of Working Partners as well as an inspection of the Banjarmasin Trisakti Seaport.*

## Koordinasi Pelayanan Publik Sektor Perhubungan Laut Bersama KPK di Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Coordination of Public Services in the Sea Transportation Sector with the KPK in West Nusa Tenggara Province*

Itjen lakukan pendampingan pelayanan publik KPK pada sektor perhubungan laut di provinsi Nusa Tenggara Barat. Itjen melakukan diskusi terkait pembahasan mengenai sumber PNBP, pemanfaatan aset, tumpang tindih regulasi, potensi pendapatan lainnya, hingga penerapan budaya anti korupsi.

Itjen menyampaikan bahwa dalam rangka pencegahan korupsi Inspektorat Jenderal melakukan berbagai program pencegahan korupsi, yakni sosialisasi unit pengendalian gratifikasi (UPG), penerapan unit kepatuhan internal (UKI), pengawalan StTRANAS-PK pada 10 Pelabuhan, pengawalan satuan pengawasn internal SPI, dan menginisiasi prinsip 4 No's (No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxury Hospitality). Pelaksanaan pelayanan publik KPK akan semakin memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan dalam penutup pihak KPK menyampaikan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi maka diperlukan penegakan aturan.

*The Inspectorate General provided assistance to the KPK's public services in the sea transportation sector in the province of West Nusa Tenggara. The Inspectorate General held discussions related to discussions regarding sources of PNBP, asset utilization, overlapping regulations, other potential income, to the application of an anti-corruption culture.*

*The Inspectorate General said that in the context of preventing corruption the Inspectorate General carried out various corruption prevention programs, namely UPG socialization, implementation of UKI, escorting Stranas PK at 10 Ports, escorting SPI, and initiating the 4 No's principle (No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxury Hospitality ). The implementation of KPK public services will further strengthen the anti-corruption culture within the Ministry of Transportation, and in closing the KPK conveys that to prevent corrupt practices, it is necessary to enforce rules.*

## Koordinasi Pelayanan Publik Sektor Perhubungan Laut Bersama KPK di Provinsi Bali

*Coordination of Public Services in the Sea Transportation Sector with the KPK in Bali Province*

Itjen lakukan pendampingan pelayanan publik KPK pada sektor perhubungan laut di provinsi Bali. Itjen melakukan diskusi terkait beberapa isu strategis antara lain sumber PNBP, pemanfaatan aset, potensi pendapatan lainnya, hingga penerapan budaya anti korupsi. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat serta persiapan untuk pelaksanaan G20 pada bulan November 2022 mendatang.

Itjen menyampaikan bahwa dalam rangka pencegahan korupsi Inspektorat Jenderal melakukan berbagai program pencegahan korupsi, yakni sosialisasi UPG, penerapan UKI, pengawalan Stranas PK pada 10 Pelabuhan, pengawalan SPI, dan menginisiasi prinsip 4 No's (No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxury Hospitality). Pelaksanaan pelayanan publik KPK akan semakin memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan dalam penutup pihak KPK menyampaikan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi maka diperlukan penegakan aturan.

*The Inspectorate General provided assistance to the KPK's public services in the sea transportation sector in the province of Bali. The Inspectorate General held discussions regarding several strategic issues, including sources of PNBP, asset utilization, potential other income, and the implementation of an anti-corruption culture. With the aim of improving the quality of public services for the community as well as preparations for the implementation of the G20 in November 2022.*

*The Inspectorate General said that in the context of preventing corruption the Inspectorate General carried out various corruption prevention programs, namely UPG socialization, implementation of UKI, escorting Stranas PK at 10 Ports, escorting SPI, and initiating the 4 No's principle (No Gift, No Bribery, No Kickback, No Luxury Hospitality ). The implementation of KPK public services will further strengthen the anti-corruption culture within the Ministry of Transportation, and in closing the KPK conveys that to prevent corrupt practices, it is necessary to enforce rules.*

## Koordinasi Kementerian Perhubungan dan PT. PELNI terkait Evaluasi Penugasan Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi Tahun Anggaran 2022

*Coordination of the Ministry of Transportation and PT. PELNI regarding Evaluation of Public Service Obligation Assignment and Subsidies for Fiscal Year 2022*

Itjen menyampaikan materi mengenai tugas fungsi Inspektorat Jenderal dimana peran Itjen yaitu sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, penyampaian hasil pengawasan oleh Itjen dalam hal ini pemaparan terkait penyelenggaraan PSO dan Subsidi, penyampaian hasil pemeriksaan BPK RI, dan tantangan kedepan penyelenggaraan PSO dan Subsidi Angkutan Laut.

*The Inspectorate General conveyed material regarding the duties and functions of the Inspectorate General where the role of the Inspectorate General is as a strategic partner and trusted advisor for work units within the Ministry of Transportation, delivery of the results of supervision by the Inspectorate General in this case exposure related to the implementation of PSO and Subsidies, submission of the RI BPK inspection results, and future challenges implementation of PSO and Sea Transportation Subsidies.*

# 07

# REGULASI

## *REGULATION*

| Jumlah Produk Hukum ITJEN<br>*Number of ITJEN Legal Products* | Jumlah<br>*Total* |
|---|---|
| **PM. MENTERI**<br>*Ministerial Decree* | 2 |
| **KM. MENTERI**<br>*Ministerial Instructions* | 3 |
| **IM. MENTERI**<br>*Ministerial Instructions* | 2 |
| **SE. MENTERI**<br>*Ministerial Circular* | 0 |
| **KEP. IRJEN**<br>*Irjen Decision* | 60 |
| **SE. IRJEN**<br>*Circular Irjen* | 2 |
| | 69 |

## Produk Hukum Tahun 2022
## *Legal Products of 2022*

**1. Peraturan Menteri Perhubungan**
***Regulation of the Minister of Transportation***

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Intern;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi

**2. Keputusan Menteri Perhubungan**
***Decree of the Minister of Transportation***

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.111 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan;

b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 384 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kantor Inspektorat Jenderal;

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.191 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pembentukan Komite Audit Kementerian Perhubungan.

**3. Instruksi Menteri Perhubungan**
***Instructions of the Minister of Transportation***

a. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 1 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

b. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

**4. Keputusan Inspektur Jenderal**
***Decision of the Inspector General***

1. Pembentukan Kelompok Kerja = 35
2. Mutasi atau Pengangkatan = 20
3. PKPT = 2
4. Rencana Strategis = 1
5. Lainnya = 2

**5. Surat Edaran Inspektur Jenderal**
***Circular of the Inspector General***

1. Surat Edaran Nomor SE-ITJEN 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan

2. Surat Edaran Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Atas Kegiatan Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

# 08 PENGELOLAAN KEUANGAN

## *FINANCIAL MANAGEMENT*

# PENGELOLAAN KEUANGAN
# *FINANCIAL MANAGEMENT*

## Realisasi Belanja
## *(Expenditure Realization)*

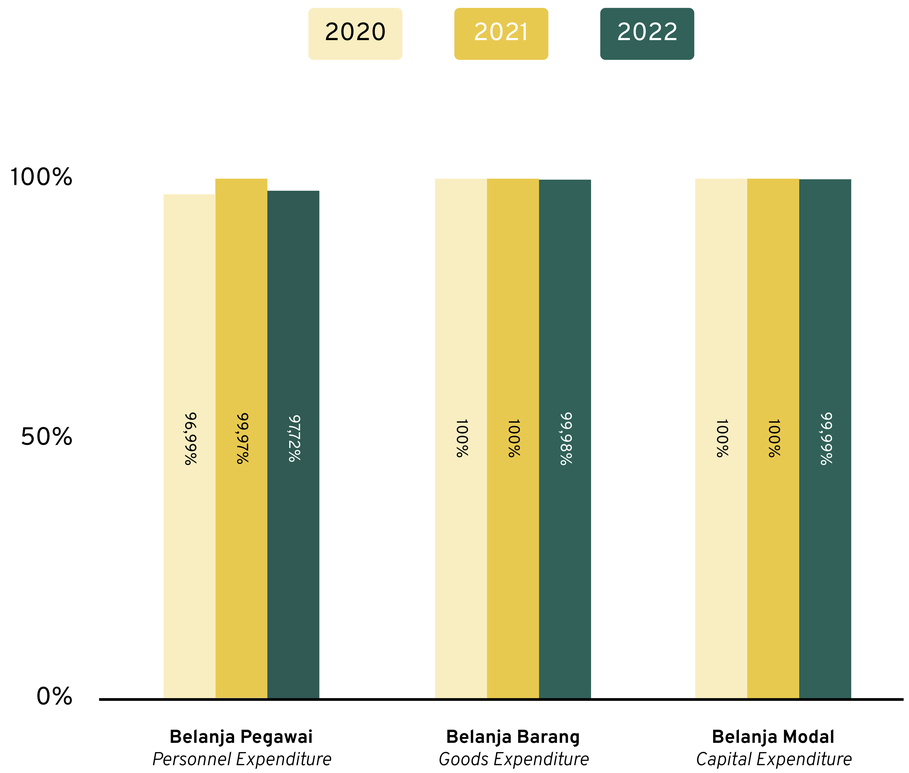


**Belanja Tahun 2022**
*Budget in 2022*

**86.157**
Juta Rupiah/ Million IDR

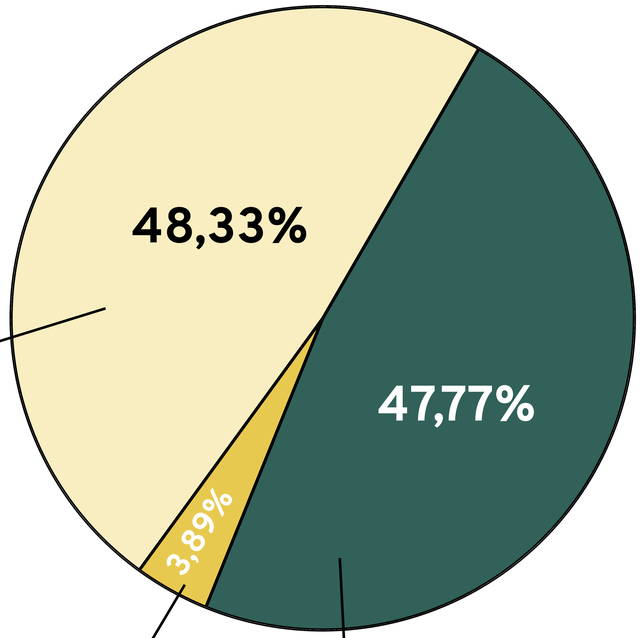


**Belanja Pegawai**
*(Personnel Expenditure)*

**41.643**
Jutaan Rupiah/ Million IDR

**Belanja Pegawai**
*(Personnel Expenditure)*

**3.352**
Jutaan Rupiah/ Million IDR

**Belanja Barang**
*(Goods Expenditure)*

**41.163**
Jutaan Rupiah/ Million IDR

# PENGELOLAAN KEUANGAN
# *FINANCIAL MANAGEMENT*

## Keuangan

Pada tahun 2022, Itjen melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.86.157.763.714,00. Selama tahun anggaran 2022, pagu Itjen mengalami penambahan pada Belanja Pegawai sebesar Rp.4.600.000.000,00 dan Belanja Barang (Covid-19) Rp.5.200.000.000,00 dari alokasi awal sebesar Rp..86.157.763.714,00. Pada tahun 2022 juga, terdapat self blocking dalam rangka automatic adjustment sebesar Rp.11.000.000.000,00 dengan rincian tahap I sebesar Rp.3.500.000.000,00 dan tahap II sebesar Rp.7.500.000.000,00 untuk penguatan anggaran terkait Covid-19.

Itjen menggunakan sumber daya input antara lain berupa anggaran sebesar Rp.86.157.763.714,00 atau 98,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp.87.136.443.000,00. Sehingga dapat diasumsikan bahwa penggunaan sumber daya anggaran untuk menghasilkan capaian kinerja tahun 2022 sangat efisien, sebab dengan input anggaran yang lebih kecil dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target yaitu 105,31%.

## *Finance*

*In 2022, the Inspectorate General will carry out the Ministry of Transportation's Apparatus Supervision and Accountability Improvement Program with a total budget allocation of IDR 86,157,763,714.00. During the 2022 fiscal year, the Itjen ceiling experienced an increase in Personnel Expenditures of IDR 4,600,000,000.00 and Goods Expenditures (Covid-19) IDR 5,200,000,000.00 from the initial allocation of IDR 86,157,763,714.00. Also in 2022, there will be self-blocking in the framework of automatic adjustment of IDR 11,000,000,000.00 with details of phase I of IDR 3,500,000,000.00 and phase II of IDR 7,500,000,000.00 for strengthening the budget related to Covid-19 .*

*The Inspectorate General uses input resources, including in the form of a budget of IDR 86,157,763,714.00 or 98.88% of the budget allocation of IDR 87,136,443,000.00. So it can be assumed that the use of budgetary resources to produce performance achievements in 2022 is very efficient, because with smaller budget inputs performance can be produced that exceeds the target of 105.31%.*

| **Jenis Belanja** ***Expenditure Type*** | **TA 2022/*FY 2022*** | | |
|---|---|---|---|
| | **Pagu (Rp)** *(Ceiling (IDR))* | **Realisasi (Rp)** *(Realization (IDR))* | **%** |
| Belanja Pegawai *(Personnel Expenditure)* | 42.614.677.000 | 41.642.846.513 | 97,72% |
| Belanja Barang *(Goods Expenditure)* | 41.169.634.000 | 41.163.077.401 | 99,98% |
| Belanja Modal *(Capital Expenditure)* | 3.352.132.000 | 3.351.839.800 | 99,99% |
| Total Belanja *(Total Expenditure)* | 87.136.443.000 | 86.157.763.714 | 98,88% |

**Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Unit Kerja**
*Financial Management Based on Work Field*

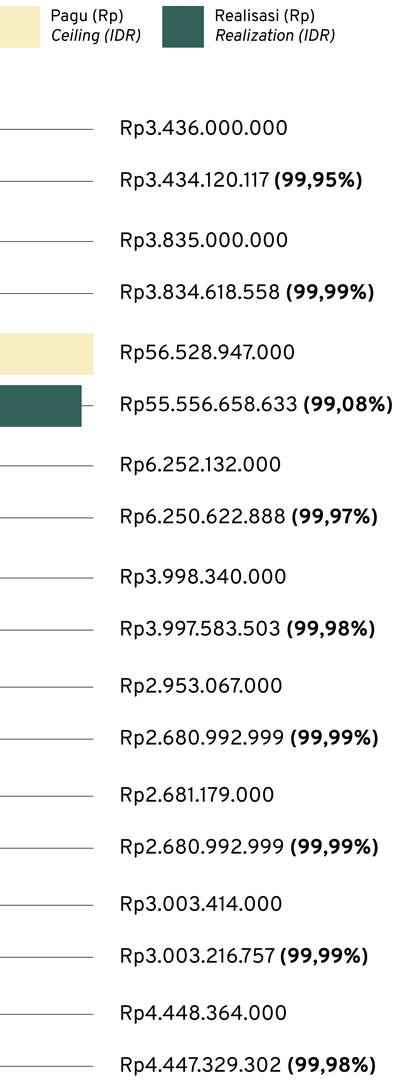

# 09

# KEGIATAN PENUNJANG

## *SUPPORTING ACTIVITIES*

# MEDIA SOSIAL INSPEKTORAT JENDERAL
# *SOCIAL MEDIA INSPECTORATE GENERAL*

## Capaian Media Sosial Inspektorat Jenderal
## *Inspectorate General Social Media Achievements*

**1,867** Posts

**4,653** Followers

**@itjenkemenhub_151**

**1,052** Tweets

**1,471** Followers

**@itjenkemenhub_151**

**1,867** Videos

**445** Subscribers

**@itjenkemenhub_151**

**360** Posts

**571** Followers

**@itjenkemenhub151**

# MEDIA SOSIAL INSPEKTORAT JENDERAL
# *SOCIAL MEDIA INSPECTORATE GENERAL*

## Buletin dan Film Pendek Inspektorat Jenderal
## *Inspectorate General Bulletin and Short Movie*

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| *6 Edition* | *2 Edition* | *2 Edition* | *2 Edition* |

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan turut berpartisipasi dalam ajang *Anti Corruption Film* Festival **(ACFFest) KPK 2022.** Pada kesempatan ini, Inspektorat Jenderal membuat film pendek berjudul **"Yanto".** Film mendapat sambutan baik dan berhasil masuk nominasi **10 besar film pendek terbaik** pada ajang ACFFest 2022 tersebut.

*The Inspectorate General of the Ministry of Transportation participated in the 2022 KPK Anti-Corruption Film Festival (ACFFest). On this occasion, the Inspectorate General made a short film entitled "Yanto". The film received a good reception and was nominated for the top 10 best short films at the 2022 ACFFest.*

# 10 PENUTUP

## *CLOSING*

# PENUTUP
# *CLOSING*

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan, pemantauan dan pendampingan terhadap berbagai proyek strategis yang menjadi atensi Menteri Perhubungan maupun Presiden Republik Indonesia.

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2022 merupakan sebuah gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen selama tahun 2022 dalam mendukung tercapainya konektivitas nasional melalui fungsi *assurance* dan *consulting* dimana Itjen bertindak sebagai *strategic partner* dan *trust advisory* bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Laporan Tahunan 2022 ini juga sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi Inspektorat Jenderal kepada masyarakat sekaligus sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal selalu berusaha untuk melakukan *continous improvement* dari sisi sumber daya manusia dan kinerja berdasarkan "trimatra" Inspektorat Jenderal yaitu profesional, integritas, dan amanah sehingga Inspektorat Jenderal dapat menjadi *strategic partner* and *trusted advisor* yang datang diharapkan, pulang dirindukan.

*To realize good governance and clean government within the Ministry of Transportation, the Inspectorate General has carried out various supervisory, monitoring and assistance activities on various strategic projects which are the attention of the Minister of Transportation and the President of the Republic of Indonesia.*

*The 2022 Annual Report of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation is an overview of the implementation of the duties and functions of the Inspectorate General during 2022 in supporting the achievement of national connectivity through the assurance and consulting function where the Inspector General acts as a strategic partner and trust advisory for work units within the Ministry of Transportation in carrying out their duties and functions.*

*This 2022 Annual Report is also a form of responsibility and transparency of the Inspectorate General to the public as well as feedback to improve organizational performance within the Ministry of Transportation. The Inspectorate General always strives to carry out continuous improvement in terms of human resources and performance based on the Inspectorate General's "three dimensions", namely professionalism, integrity and trustworthiness so that the Inspectorate General can become a strategic partner and trusted advisor who is expected to come home, missed home.*

"JIKA KITA MENGANGGAP SUATU PEKERJAAN ITU **PENTING,** MAKA KITA AKAN MENGERJAKANNYA DENGAN CARA **TERBAIK**"

"KETIKA **INTEGRITAS** TIDAK MENJADI **PRIORITAS,** MAKA **AKTIVITAS** HANYALAH **FORMALITAS**"

**INSPEKTORAT JENDERAL**
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Gd. Karsa Lt. 6 - Jakarta Pusat 10110